



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940
Telp. (021) 5253004 (8 saluran) Ext. 710, Fax (021) 5253157
Website : <http://www.kemkumham.go.id>

Nomor : SEK-PR.04.02-03

6 Januari 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
3. Para Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Target kinerja merupakan strategi percepatan kegiatan** yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah;
- b. **Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor wajib** melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan target kinerja;
- c. **Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan** melalui aplikasi monitoring kinerja.kemenkumham.go.id;

- d. **Penilaian atas capaian target kinerja dilakukan setiap triwulan** tanggal 6 s.d.15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun 2023 dan tanggal 6 s.d. 15 Januari tahun 2024 oleh Unit Eselon I;
- e. **Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi** dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan tanggal 5 pada bulan April, Juli, Oktober tahun 2023 dan 5 Januari 2024;
- f. **Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester** melalui Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

TARGET KINERJA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2023

“Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM

Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK**

dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel”





Apel Pagi Awal Tahun 2023 pada Rabu, (4/1/2023)


PENGANTAR

Memulai kinerja di tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Target Kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, menetapkan 116 Target Kinerja yang meliputi 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah.

Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yakni "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK** dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel" sehingga dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju.

Akhir kata, mari bersama-sama menjalankan Target Kinerja ini dengan sungguh-sungguh untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Laoly



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.**
- KESATU** : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA** : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
 3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman kinerja.kemenkumham.go.id;
 2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
 3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
 4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
 2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
 3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM** : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
 2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
 3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH** : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
 2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

DAFTAR ISI

TARGET KINERJA UNIT UTAMA

Sekretariat Jenderal	1
Inspektorat Jenderal	7
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	17
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	23
Direktorat Jenderal Imigrasi	58
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	64
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	79
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	83
Badan Pembinaan Hukum Nasional	92
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM	94
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97

TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

Divisi Administrasi	1
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	7
Divisi Pemasyarakatan	54
Divisi Imigrasi	85



TARGET KINERJA UNIT UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

TARGET KINERJA UNIT UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Menurunnya nilai temuan BPK di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Menurunnya nilai temuan pengadaan barang/jasa yang menjadi objek pemeriksaan BPK	B06: Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	B06: Laporan Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	BIRO PENGELOLAAN BMN
				B12: Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	B12: Laporan Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	
2	Meningkatnya Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tercapainya Nilai indeks pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tercapainya Nilai indeks pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: 1. Pembentukan SK TIM 2. Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: 1. SK TIM 2. Laporan Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	BIRO UMUM
				B06: Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis	B06: Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis	
				B09: Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis	B09: Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan Dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Tercapainya Hasil Laporan Penilaian Indeks Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan Dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis	B12: Laporan Indeks Penilaian Pengawasan Lapangan	
3	Pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya indeks sistem merit	Peningkatan nilai indeks sistem merit	<p>B03: 1. Pengumpulan data dan inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 2. Persiapan pelaksanaan verifikasi data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 3. Persiapan dan Sosialisasi Penyusunan dokumen pengembangan karir 4. Penyiapan/ pengumpulan bahan dokumen pengembangan karir</p> <p>B06: 1. Verifikasi data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 2. Pelaksanaan dan Penetapan Dokumen pengembangan karir</p>	<p>B03: 1. Data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dengan data dari: a. unit kerja b. hasil penilaian kompetensi c. gap kebutuhan dalam standar kompetensi jabatan 2. SK Tim Penyusunan Verifikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 3. SK Tim dan SK Narasumber sosialisasi penyusunan dokumen pengembangan karir 4. Bahan dokumen pengembangan karir</p> <p>B06: 1. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (3000 pegawai) 2. Dokumen pengembangan karir unit utama dan kanwil (500 pegawai)</p>	BIRO KEPEGAWAIAN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 2. Pelaksanaan dan Penetapan Dokumen pengembangan karir 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (3000 pegawai) 2. Dokumen pengembangan karir unit utama dan kanwil (500 pegawai) 	
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Evaluasi penyusunan dokumen pengembangan kompetensi 2. Evaluasi Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Pemantauan dan evaluasi 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi penyusunan dokumen pengembangan kompetensi 2. Laporan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Laporan Pemantauan dan evaluasi 	
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham 95	Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham	Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan SK TIM 2. Melakukan Evaluasi terhadap Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA TA 2022 dibawah 95 3. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 pada Tahun Anggaran 2022 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK TIM 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal – Monev IKPA TA 2022 3. Laporan Evaluasi dan Kegiatan 	BIRO KEUANGAN
			<p>B06 :</p> <p>Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 pada Tahun Anggaran 2022</p>	<p>B06:</p> <p>Laporan Evaluasi dan Kegiatan</p>		
			<p>B09 :</p> <p>Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 pada Tahun Anggaran 2022</p>	<p>B09:</p> <p>Laporan Evaluasi dan Kegiatan</p>		

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12 : Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 95 pada 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B12: Laporan Evaluasi dan Kegiatan	
5	Mendorong Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI	Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI dapat diselesaikan dengan cepat	Temuan Pemeriksaan BPK RI dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI	B03 : Evaluasi Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI TA 2021 dan tahun-tahun sebelumnya	B03 : Rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI TA 2021 dan tahun-tahun sebelumnya beserta progress tindak lanjutnya	BIRO KEUANGAN
				B06 : Terinventarisirnya Temuan Pemeriksaan BPK RI TA 2022	B03 : Rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI TA 2022 dan tahun-tahun sebelumnya beserta <i>progress</i> tindak lanjutnya	
				B12 : Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI tahun 2022	B12 : Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI tahun 2022	
6	Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	B03 : 1. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022 2. Tersusunnya Laporan Keuangan TA. 2022 <i>Unaudited</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	B03 : Laporan Keuangan TA. 2022 Unaudited	BIRO KEUANGAN
				B06 : 1. Tersusunnya Laporan Keuangan TA. 2022 <i>Audited</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2023	B06 : 1. Laporan Keuangan TA. 2022 <i>Audited</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2023	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I T.A. 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	B09: Laporan Keuangan Semester I T.A. 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	
7	Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya nilai indeks SPBE Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya pelayanan dan pelaksanaan berbasis eletronik secara efektif dan efisien	B06: Pembentukan TIM penilaian mandiri SPBE B09: Mengumpulkan data dukung dan Melaksanakan penilaian mandiri B12: Unggah data dukung Situs SPBE Kemenpan dan RB	B06: SK TIM penilaian mandiri SPBE B09: Dokumen pendukung penilaian Unit Eselon I dan Laporan Pelaksanaan B12: <i>Capture</i> Unggah data dukung	PUSDATIN
8	Pelaksanaan Perencanaan BMN Kemenkumham secara tepat waktu dan akurat	Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat	Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat	B03: Penetapan Kepmen SBSK B09: Penyampaian RKBMN ke Kementerian B12: 1. Penyampaian RKBMN ke DJKN 2. Tersusunnya Dokumen RKBMN Kementerian	B03: Kepmen SBSK B09: Dokumen RKBMN seluruh satuan kerja B12: 1. Dokumen RKBMN Kementerian 2. Hasil Dokumen RKBMN Kementerian dari DJKN	BIRO PENGELOLAAN BMN
9	Data BMN Kementerian Hukum dan HAM tercatat, tervalidasi dan akurat	Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi dan akurat	Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi dan akurat	B03: 1. Pemutakhiran Data BMN dan Penyusunan CaLBMN tingkat Nasional periode Tahunan tahun 2022. 2. Penyusunan Laporan BMN tingkat Kementerian <i>Unaudited</i> Tahun 2022.	B03: 1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 2. Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun 2022	BIRO PENGELOLAAN BMN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: 1. Pemutakhiran Data BMN dan Penyusunan CaLBMN tingkat Nasional periode Semester I tahun 2023. 2. Penyusunan Laporan BMN tingkat Kementerian Semester I Tahun 2023.	B08: 1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 2. Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023.	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.	Meningkatnya Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Nilai RBKementerian Hukum dan HAM	B03 : 1. Pembentukan Tim RB dan Tim Asesor PMPRB Kementerian Hukum dan HAM 2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Asesor pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB B09: Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 B12: 1. Persiapan Evaluasi RB Th 2022 (Evaluasi PMPRB Kementerian oleh Kementerian PAN RB) 2. Evaluasi RB Th 2022 (Evaluasi PMPRB Kementerian oleh Kementerian PAN RB)	B03 : 1. SK Tim RB dan Tim Asesor PMPRB Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 3. Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Asesor pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB B09: Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 B12 : Laporan Persiapan Evaluasi RB Th 2022	BIRO PERENCANAAN
11	Terciptanya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif	Meningkatnya Nilai SAKIP Kemenkumham	Meningkatnya Nilai SAKIP Kemenkumham	B03 : 1. Pembentukan TIM LKjIP 2. Penyusunan LKjIP Th.2022 Kementerian Hukum dan HAM	B03 : 1. SK TIM LKjIP 2. LKjIP Th.2022 Kementerian Hukum dan HAM	BIRO PERENCANAAN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	B12: Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	
INSPEKTORAT JENDERAL						
12	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tersusunnya laporan Kinerja (LKIP/LKJIP) pada Unit Pelaksana Teknis dan Balai	Tersusunnya laporan Kinerja (LKIP/LKJIP) pada Unit Pelaksana Teknis dan Balai	Tersusunnya laporan Kinerja (LKIP/LKJIP) pada Unit Pelaksana Teknis dan Balai	B01: 1. Matriks pemetaan/Identifikasi Satuan Kerja yang akan dilakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LkjiP) 2. Surat Perintah Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LkjiP) di masing-masing Satuan Kerja B02: Surat Perintah Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja (LkjiP) B03: Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja (LkjiP) B04: - B05: Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi SAKIP B06: 1. Surat Perintah Pelaksanaan Panel Evaluasi SAKIP 2. Berta Acara Hasil Panel	Inspektorat Wilayah V

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B07: 1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham 2. Surat Menteri Hukum dan HAM ke Menteri PAN-RB hal usulan nilai SAKIP Kementerian B08: - B09: - B10: Surat Perintah Pelaksanaan Monitoring tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP B11: Laporan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP B12: -	
13	Kapabilitas APIP Kemenkumham Level 4	Terpenuhinya data dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Menuju Level 4	Terpenuhinya data dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Menuju Level 4	Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham Menuju Level 4	B01: Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal B02: 1. Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal; 2. <i>Workshop</i> /PKS Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dalam Penilaian SPIP Terintegrasi. B03: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Wilayah I dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B04: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B05: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B06: Surat Perintah kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B07: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B08: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B09: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan kegiatan Pendampingan Evaluasi Penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B10: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B11: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B12: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p>	
14	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP pada seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	Maturitas SPIP Menuju Level 4	Peningkatan maturitas SPIP Menuju Level 4	<p>B01: Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal</p> <p>B02: 1. Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal; 2. <i>Workshop</i>/PKS Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dalam Penilaian SPIP Terintegrasi.</p>	Inspektorat Wilayah I

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B03: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B04: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B05: Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku koordinator PM terkait hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	
					B06: Surat Perintah kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B07: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
					B08: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B09: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan kegiatan Pendampingan Evaluasi Penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B10: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B11: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B12: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p>	
15	Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko	Implementasi Manajemen Risiko	Pelaksanaan Pendampingan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>B01: Surat Irjen ke seluruh satker di lingkungan Kemenkumham</p> <p>B02: Hasil survei seluruh satker</p> <p>B03: Notula/Laporan <i>Workshop</i> persiapan pelaksanaan pendampingan penerapan MR</p>	Inspektorat Wilayah III

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B04: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B05: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B06: Laporan Kompilasi Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B07: Surat Irjen ke satker yang akan dilakukan evaluasi penerapan MR B08: Hasil Survei Evaluasi Penerapan MR B09: SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B10 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B11 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B12: Laporan kompilasi Evaluasi Penerapan MR	
16	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan	Pelaksanaan pengawasan yang efektif mengacu pada perencanaan kegiatan	Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan	Pelaksanaan Pengawasan melalui Pendampingan, Reviu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	B01: Matriks hasil pemetaan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan Inspektorat Jenderal B02: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan	Inspektorat Wilayah IV

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B03: 1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil pendampingan dan audit 4. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja</p>	
					<p>B04: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B05: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B06: 1. Laporan Pelaksanaan pendampingan, reviu dan audit 2. Laporan Kinerja Semester 3. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja.</p>	
					<p>B07: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B08: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B09: 1. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit dan Reviu 2. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja. 3. Laporan Kinerja Triwulan</p>	
					<p>B10: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B11: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan B12: 1. Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Audit Tahun 2022	
17	Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Satuan kerja berpredikat WBK/WBBM yang ditetapkan oleh TPN	8% dari Satuan Kerja Usulan TPI ke TPN memperoleh predikat WBK/ WBBM	B01: 1. SK Menteri perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 2. SK Irjen perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 3. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Kalender Kerja TPI dalam Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 B02: Laporan Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM B03: Surat Kepala Unit Eselon I perihal Pengajuan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023	Inspektorat Wilayah VI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 2. Laporan Hasil Pelaksanaan <i>Workshop</i> Persiapan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 <p>B05</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Panel TPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 kepada Inspektur Jenderal 2. Laporan hasil Evaluasi satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum dan HAM RI 3. SK Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Satuan Kerja ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Surat Pengusulan Ke Menpan RB <p>B06:</p> <p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua.</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B07: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua</p> <p>B08-09: Laporan Hasil Pendampingan Desk Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh TPN Tahun 2023</p> <p>B10: Desk Evaluasi Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN</p> <p>B11: Laporan Hasil Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN dengan Metode Verifikasi Lapangan Tahun 2023</p> <p>B12: Undangan Menpan RB kepada Menteri Hukum dan HAM perihal Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2023 pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM						
18	Implementasi <i>Corporate University</i> dalam peningkatan kompetensi SDM Pegawai Ditjen AHU untuk meningkatkan layanan AHU	Meningkatnya pemahaman seluruh pegawai Ditjen AHU terhadap layanan AHU	Terciptanya SDM yang unggul dalam memberikan pelayanan AHU terbaik kepada masyarakat	<p>B01 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Bimtek Pegawai AHU</p> <p>B02 Pembentukan TIM Pengajar dan Penyusun Materi Bimtek</p>	<p>B01 Daftar Inventarisasi Kebutuhan Bimtek</p> <p>B02 SK TIM Penyusun Materi Bimtek</p>	Sekretariat Ditjen AHU (Kepegawaian)

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Menyusun materi Bimtek	B03 Materi Bimtek	
				B04 Opsi 1 Bimtek Layanan Perdata	B04 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Perdata (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05 Bimtek Layanan Perdata	B05 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Perdata (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06 Bimtek Layanan tata Negara	B06 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Tata Negara (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07 Bimtek Layanan OPHI	B07 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan OPHI (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B08 Bimtek Layanan Pidana	B08 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Pidana (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Bimtek TI	B09 Laporan pelaksanaan Bimtek TI (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B10 Bimtek Dukungan Manajemen	B10 Laporan pelaksanaan Bimtek Dukungan Manajemen (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Bimtek Dukungan Manajemen	B11 Laporan pelaksanaan Bimtek Dukungan Manajemen (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12 Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	B12 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	
19	Pencetakan Sertifikat Apostille di Kantor Wilayah Kemenkumham	Pelaksanaan pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah Kemenkumham	Jumlah pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah Kemenkumham	B01 – B03 Inventarisasi dan Identifikasi data permohonan <i>Apostille</i>	B01-B03 Data Statistik jumlah permohonan dan asal dokumen <i>Apostille</i> di wilayah	
				B04 Koordinasi dengan Kantor Wilayah	B04 Laporan Hasil Koordinasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05-B06 Persiapan Layanan <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah (Pengembangan Aplikasi dan Persiapan Infrastruktur)	B05-B06 Laporan Persiapan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07 <i>Training of Trainer</i> Layanan <i>Apostille</i> untuk Kantor Wilayah	B07 Laporan Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> Layanan <i>Apostille</i> (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B08 Uji Coba Aplikasi dengan Pemohon Kantor Wilayah	B08 Laporan pelaksanaan Uji Coba Aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah	B09 Laporan Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10 Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah	B10 Laporan Implementasi pencetakan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B11 Evaluasi	B11 Laporan Evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
20	Membangun informasi data Notaris terkait Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN berbasis <i>Online</i> .	Update informasi data Notaris, kemudahan & transparansi serta percepatan pelaksanaan tugas MPN & MKN melalui pelayanan berbasis <i>Online</i>	Terwujudnya seluruh Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN berbasis <i>Online</i> yang berskala Nasional	B01 Penyusunan daftar inventaris masalah	B01 Daftar Inventarisasi Masalah	Direktorat Perdata (Notariat)
				B02 Penyusunan Draft <i>Grand Design</i>	B02 1. Laporan Penyusunan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft <i>Grand Design</i>	
				B03 Finalisasi <i>Grand Design</i>	B03 1. Laporan Finalisasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. <i>Grand Design</i>	
				B04-B06 Pengembangan sistem layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B04-B06 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07-B08 Pengembangan system layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B07-B08 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Uji coba system layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B09 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10-B11 Sosialisasi Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN secara <i>Online</i>	B10-B11 Laporan Sosialisasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12 Evaluasi Terkait Penggunaan Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN	B12 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
21	Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	Tersusunnya Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B01: Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan dan Koordinasi Awal	B01: 1. SK Tim 2. Laporan Koordinasi Awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	Direktorat Perdata
				B02: Rapat Pembahasan penyusunan daftar Identifikasi Permasalahan	B02: Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B03 Rapat Pembahasan penyusunan daftar Identifikasi Permasalahan	B03 1. Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Daftar Inventarisasi Masalah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 Rapat Pembahasan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B04 Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05 Rapat Pembahasan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B05 Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B06 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	
				B07 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B07 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	
				B08 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B08 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Finalisasi draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B09 Laporan Finalisasi Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B10 Finalisasi draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B10 Laporan Finalisasi Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B11 Penetapan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B11 1. Laporan Penetapan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Kebijakan yang telah ditandatangani	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN						
22	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka <i>Overstaying</i> Tahanan di Lapas dan Rutan	B01 Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan <i>overstaying</i> tahanan	B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan <i>overstaying</i> tahanan	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 <i>Mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	B02 Laporan <i>mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	B03 Laporan <i>mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	
				B04 Melaksanakan FGD Mahkumjakpol terkait penanganan <i>overstaying</i> tahanan	B04 Laporan Pelaksanaan FGD Mahkumjakpol terkait penanganan <i>overstaying</i> tahanan	
				B05 Melaksanakan Desiminasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	B05 Laporan Pelaksanaan Deseminasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	
				B06 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B06 Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	
				B07 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B07 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling	
				B08 Sosialisasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	B08 Laporan Sosialisasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	
				B09 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B09 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling	
				B10 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	
23	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	Terselenggara Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	B01 Penyusunan SK Tim Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B01 SK Tim Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B02 Laporan Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B03 Asistensi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B03 Laporan Asistensi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	
				B04 Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B04 Laporan FGD Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B05 Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B05 Laporan Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B06 Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan.	B06 Laporan FGD Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07 Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B07 Laporan Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	
				B09 Supervisi Pelayanan Tahanan	B09 Laporan Supervisi Pelayanan Tahanan	
				B10 Supervisi Pelayanan Tahanan	B10 Laporan Pelayanan Tahanan	
				B11 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Tahanan Kegiatan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Hukum	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
24	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar.	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar.	B01 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B02 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B03 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B04 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B04 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B05 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B05 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B06 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B06 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B07 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B07 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	
				B09 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B09 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
25	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat.	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat.	B01: Sosialisasi SK Direktur Jenderal Masyarakat tentang Penetapan UPT Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B01: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
				B02: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B03: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B04: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B04: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B05: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B05: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B06: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B06: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B07: Monitoring UPT Masyarakat Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat	B07: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	B08: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B09: Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	B09: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B10: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B01- 06)	B10: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Januari-Juni 2023	
				B11: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B07- 09)	B11: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Juli-September 2023	
				B12: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B10-12)	B12: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Oktober-Desember 2023	
26	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan bagi tahanan dan WBP	Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	Tersusunnya Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan pada 40 UPT Pemasyarakatan	B01: Persiapan Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B01: Laporan Pelaksanaan Rapat Persiapan, dan Draft SK Tim Penyusun	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
				B02: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B02: Laporan Pelaksanaan Hasil FGD I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B03: Laporan Pelaksanaan Hasil FGD II	
				B04: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B04: Laporan Pelaksanaan Hasil Uji Petik.	
				B05: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B05: Laporan Pelaksanaan Hasil Uji Petik	
				B06: Finalisasi Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B06: Draft Final, dan Nota Dinas Pengajuan Legalitas Standar.	
				B07: Diseminasi Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B07: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Standar.	
				B08: Penguatan Kapasitas 40 Kepala UPT Masyarakat Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B08: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	
				B10: Penguatan Kapasitas Petugas Kesehatan 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B10: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	
				B11: Monitoring Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	B11: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	
				B12: Monitoring Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	B12: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	
27	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan	Terpenuhinya asupan makanan tahanan/anak binaan/narapidana sesuai angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan	85% tahanan/anak binaan/narapidana memiliki status gizi normal selama berada di Rutan/LPKA/Lapas	B01 : Pembentukan tim penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam Permenkumham 40 Tahun 2017	B01 : SK Tim	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B02 : • Supervisi Permenkumham 40 Tahun 2017 • Penyusunan rencana program kegiatan pengukuran status gizi di UPT <i>Pilot Project</i>	B02 : •Laporan supervisi •Program dan <i>timeline</i>	
				B03 : • Penyusunan dan Penetapan UPT <i>Pilot Project</i> • Rapat koordinasi tentang kegiatan pengukuran status gizi	B03 : •SK UPT <i>Pilot Project</i> • Laporan pelaksanaan rapat koordinasi tentang kegiatan pengukuran status gizi	
				B04 : •Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah I; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah I	B04 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah I • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah I	
				B05 : • Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah II dan III; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah II dan III	B05 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah II dan III; • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah II dan III	
				B06 : Evaluasi program pengukuran status gizi wilayah I, II dan III	B06 : laporan evaluasi wilayah I, II dan III	
				B07 : • Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah IV dan V; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah IV dan V	B07 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah IV dan V; • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah IV dan V	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Evaluasi program pengukuran status gizi wilayah IV dan V	B08 : laporan evaluasi wilayah I, II dan III	
				B09 : Penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam	B09 : Draft Rekomendasi kebijakan	
				B10 : Penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam Permenkumham 40 Tahun 2017	B10 : Rekomendasi kebijakan	
				B11 : Monitoring dan evaluasi	B11 : Laporan monitoring dan evaluasi	
				B12 : Monitoring dan evaluasi	B12 : Laporan monitoring dan evaluasi	
28	Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat.	Tersusunnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat	Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat	B01: Pembentukan SK Tim Perumusan Usulan Peraturan Meteri Hukum dan HAM tentang Sistem Informasi Masyarakat	B01: SK Tim Perumusan Usulan Peraturan Meteri Hukum dan HAM tentang Sistem Informasi Masyarakat	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			B02: Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat.	B02: Laporan Kegiatan Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat		
			B03: Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat	B03: Laporan Kegiatan Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat		
			B04: Penyusunan Naskah Pra Kebijakan bersama Balitbang HAM.	B04: Naskah Pra Kebijakan		

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pembahasan <i>Outline</i> Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B05: Laporan Pembahasan <i>Outline</i> Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B06: Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B06: Laporan Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B07: Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	B07: Laporan Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	
				B08: Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	B08: Laporan kegiatan Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	
				B09: Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	B09: Laporan kegiatan Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah.	
				B10: Harmonisasi Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat.	B10: Laporan Kegiatan Harmonisasi Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B11: Pengesahan Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B11: Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Sosialisasi Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	B12: Laporan Sosialisasi Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	
29	Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI	Penerapan SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan	Penerapan SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan	B01: 1.Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Ditjenpas Tahun 2023 2.Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	B01: 1.SK Tim Pelaksana SPPT TI Ditjenpas Tahun 2023 2.SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
				B02: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B02: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B03: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B04: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B04: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B05: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B05: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B06: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester I	B06: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B07: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B08: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B08: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B09: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B09: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B10: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B10: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B11: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester II	B11: 1.Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester II	
				B12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
30	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 wilayah yaitu: 1. Kota Denpasar (Bali) 2. Kota Manado	Terlaksananya penerapan keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah yaitu: 1.Kota Denpasar	B01: Pembentukan SK Tim B02: Perencanaan Rapat Kordinasi 10 Wilayah	B01: SK Tim B02: Laporan Perencanaan <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		(Sulawesi Utara) 3. Jambi (Jambi) 4.Mataram (Nusa Tenggara Barat) 5.Pontianak (Kalimantan Barat), 6. Samarinda (Kalimantan Timur) 7. Bengkulu (Bengkulu) 8. Kendari (Sulawesi Tenggara) 9. Pekanbaru (Riau) 10. Padang (Sumatra Barat)	(Bali) 2. Kota Manado (Sulawesi Utara) 3. Jambi (Jambi) 4.Mataram (Nusa Tenggara Barat) 5.Pontianak (Kalimantan Barat), 6.Samarinda (Kalimantan Timur) 7. Bengkulu (Bengkulu) 8. Kendari (Sulawesi Tenggara) 9. Pekanbaru (Riau) 10.Padang (Sumatra Barat)	B03: Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa di 10 Wilayah	B03: Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa di10 Wilayah	
				B04: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B04: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B05: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B05: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B06: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah	B06: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B07: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B07: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B08: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah.	
				B09: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B09: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah.	
				B10: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B10: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
				B11: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B11: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
				B12: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B12: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
31	Pemberdayaan Pokmas bagi Klien Pemasarakatan	Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Pokmas	Terbentuknya Rumah Singgah atau Rumah	B01: Penyusunan SK Tim Asistensi Pemberdayaan Pokmas Lipas	B01: SK Tim Asistensi Pemberdayaan Pokmas Lipas	Direktorat Bimbingan Kemasyaratan dan Pengentasan Anak

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Lipas dan Penerima Manfaat	Kolaborasi "Griya Abhipraya"	B02: Asistensi Penyusunan Rencana Program Pemberdayaan Pokmas Lipas (33 wilayah)	B02: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B03: Sosialisasi Program Pembentukan Griya Abhipraya	B03: Laporan Kegiatan Sosialisasi	
				B04: Pemetaan Peluang Rencana Pembentukan Griya Abhipraya di Bapas	B04: Dokumen Hasil Pemetaan Peluang	
				B05: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B05: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B06: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B06: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B07: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B07: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B08: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (9 wilayah)	B08: Laporan Kegiatan Asistensi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B09: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B10: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B10: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B11: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B11: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B12: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (9 wilayah)	B12: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
32	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat	B01: Koordinasi dengan Kanwil terkait pembentukan tanda daftar bengkel kerja Lapas menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK)	B01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pembentukan tanda daftar bengkel kerja Lapas menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK)	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
				B02: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B02: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B03: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B03: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B04: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B05: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B05: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B06: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftarnya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B06: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	
				B07: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B07: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B08: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B08: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B09: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	
				B10: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B10: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B11: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B11: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B12: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan latihan keterampilan di Lapas	B12: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan 3. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%	<p>B01 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Penyusunan surat edaran tentang tindak lanjut tarja tahun 2023 	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft surat edaran tentang tindak lanjut tarja tahun 2023. 2. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 3. Laporan hasil penilaian pembinaan pada bulan Desember 	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
			<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Ditandatanganinya Surat Edaran tentang tindak lanjut tarja dibidang pembinaan kepribadian 	<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Surat edaran tentang tentang tindak lanjut tarja dibidang pembinaan kepribadian 		
				<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada bulan Februari. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret. 	<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret. 2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 	
				<p>B05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April. 	<p>B05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06:</p> <p>1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p>	<p>B06:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Mei. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B07:</p> <p>1.75% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.75% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.75% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.75% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p>	<p>B07:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08:</p> <p>1.80% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.80% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.80% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.80% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p>	<p>B08:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B09:</p> <p>1.85% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.85% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.85% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.85% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p>	<p>B09:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10:</p> <p>1.90% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.90% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.90% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.90% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p>	<p>B10:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B11:</p> <p>1.95% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.95% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.95% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.95% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p>	<p>B11:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 1.100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.100% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.	B12: 1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November. 2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan November. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	
33	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01: Menyusun Surat Edaran terkait Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B02 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B03 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B04 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B05 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01: Surat Edaran Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B02 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B03 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B04 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B05 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B06 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B07 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B07 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B08 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B08 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B09 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B09 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B10 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B10 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B11 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B11 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B12 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B12 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
34	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian bekerja sama/bermitra dengan pihak ketiga.	Terselenggaranya kegiatan produktif pada Lapas dengan melaksanakan kemitraan minimal 3 (tiga) mitra.	B01: Koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan.	B01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			<p>Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang <i>Pilot Project</i> Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas</p>	
				<p>B03: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	<p>B04: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	
				<p>B05: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	<p>B05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	
				<p>B06: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B06: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B07: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B07: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B08: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B09: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B09: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B10: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B10: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B11: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B11: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B12: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B12: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan peningkatan Kepatuhan Internal Petugas	Meningkatnya Kepatuhan Internal Petugas dalam meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban	1.Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan penginputan SDP Fitur Keamanan secara baik dan benar 2.Melakukan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	B01 Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh Divisi Pemasyarakatan	B01 Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja	Direktorat Keamanan dan Ketertiban
				B02 Pembentukan Operator SDP di tingkat pusat, wilayah dan UPT	B02 SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat pusat, wilayah dan UPT	
				B03 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B03 1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04</p> <p>1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik</p>	<p>B04</p> <p>1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis</p> <p>2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan</p>	
				<p>B05</p> <p>1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik</p>	<p>B05</p> <p>1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis</p> <p>2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan</p>	
				<p>B06</p> <p>1. Sebanyak 50% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar.</p> <p>2. Melaksanakan sidang kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik</p>	<p>B06</p> <p>1. Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p>2. Laporan pelaksanaan sidang kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik</p>	
				<p>B07</p> <p>Sebanyak 60% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar</p>	<p>B07</p> <p>Sebanyak 60% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08 Sebanyak 80% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	B08 Sebanyak 80% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	
				B09 1. Sebanyak 100% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B09 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
36	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan melakukan deteksi dini	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA	B01 1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh Divisi Pemasarakatan 2. Pembentukan UIP pada setiap Kantor wilayah 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan 4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib	B01 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja 2. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 3. Rekap dari kanwil nama, NIP, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT di wilayah nya 4. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini	Direktorat Keamanan dan Ketertiban
				B02 1. Pembentukan UIP pada setiap Kantor wilayah 2. <i>Profiling</i> Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah	B02 1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen <i>Profiling</i> Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat</p> <p>3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B03</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p>	
				<p>B04</p> <p>1.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah</p> <p>2.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p>	<p>B04</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen	B05 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis anggota UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen	
				B06 1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B06 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencan a aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini 4. Laporan hasil konsolidasi	
				B07 Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel	B07 Laporan kegiatan Intelijen	
				B08 Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel	B08 Laporan kegiatan Intelijen	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09 1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B09 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen 3.Laporan hasil konsolidasi</p>	
				<p>B10 Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p>	<p>B10 Laporan kegiatan intelijen</p>	
				<p>B11 Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel</p>	<p>B11 Laporan kegiatan Intelijen</p>	
				<p>B12 1. Monev Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B12 1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan intelijen 3.Laporan hasil konsolidasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI						
37	Pengembangan Paspor <i>Online</i>	Diimplementasikannya Paspor <i>Online</i> terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor <i>Online</i> secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	<p>B03 Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep panduan penggunaan Paspor <i>Online</i> terbaru 2. Rapat penyusunan konsep panduan penggunaan Paspor <i>Online</i> dengan Direktorat Teknis terkait 3. Sosialisasi Paspor <i>Online</i> secara nasional <p>B03: Penyusunan panduan dan sosialisasi Paspor <i>Online</i> secara nasional</p> <p>B06 Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Paspor <i>Online</i> secara regional 2. Evaluasi Penerapan Paspor <i>Online</i> secara regional 3. Penerapan Paspor <i>Online</i> secara nasional <p>B06: Implementasi Paspor <i>Online</i> secara nasional</p> <p>B09 Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi <p>B09: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Paspor <i>Online</i></p>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen panduan penggunaan Paspor <i>Online</i> 2. Laporan sosialisasi Paspor <i>Online</i> secara nasional <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Implementasi Paspor <i>Online</i> secara regional 2. Laporan Implementasi Paspor <i>Online</i> secara nasional <p>B09:</p> <p>Laporan monitoring dan evaluasi</p>	DIT. LANTASKIM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B12 Tahapan: Penyusunan konsep revisi SOP Paspor <i>Online</i></p> <p>B12: Penyempurnaan alur proses dan kebijakan Paspor <i>Online</i></p>	<p>B12: 1. Konsep usulan pengembangan fitur Paspor <i>Online</i> hasil evaluasi 2. Konsep revisi SOP Paspor <i>Online</i></p>	
38	Peningkatan kualitas SDM dalam membuat Laporan Harian Intelijen pada Aplikasi LHI	Peningkatan kualitas SDM dalam membuat Laporan Harian Intelijen pada Aplikasi LHI	Setiap pengampu tusi mampu menyusun dan membuat Laporan Harian I	<p>B01: Menyusun rencana kegiatan penguatan guna peningkatan SDM di bidang pembuatan LHI</p> <p>B02: Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Diklat Polri Soreang</p> <p>B03: Menyiapkan dokumen rancangan PKS dan SK penguatan dasar intelijen imigrasi bagi staf inteldak UPT dan Divisi Keimigrasian</p> <p>B04: Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penguatan dengan Lembaga Diklat Polri Soreang</p>	<p>B01: 1. Dokumen rencana kegiatan 2. Surat Direktur Jenderal Imigrasi 3. Surat Direktur Intelijen Keimigrasian kepada Divisi dan UPT Keimigrasian untuk percepatan laporan 4. Dokumen rapat persiapan pelatihan</p> <p>B02: Laporan koordinasi terkait: 1. Model penguatan 2. Jam pelajaran 3. Jumlah peserta</p> <p>B03: 1. PKS Penguatan Dasar Intelijen Keimigrasian 2. SK Panitia Penguatan Dasar Intelijen Keimigrasian 3. SK Penetapan Peserta Penguatan Dasar Intelijen Keimigrasian</p> <p>B04: Laporan kegiatan koordinasi Tahapan</p>	DIT INTELKIM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Menyelenggarakan penguatan intelijen imigrasi Tahap 1 bagi staf inteldak UPT dan Divisi Keimigrasian (86 orang)	B05: Laporan kegiatan	
				B06: Menyelenggarakan penguatan intelijen imigrasi Tahap 2	B06: Laporan kegiatan	
39	Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> di Wilayah Indonesia	Proses Klasifikasi Pengungsi (Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>)	Adanya informasi dan data tentang jumlah Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B03 Tahapan: 1. Pengumpulan Data 2. Penyampaian Berita Acara Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> B03: Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B03 Laporan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	DIT. WASDAKIM
				B06 Tahapan: 1. Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> . 2. Tersedia Data tentang Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> . B06: Monitoring Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B06 Dokumen Hasil Pendataan	
				B09 Tahapan: 1. Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> .	B09 Dokumen Hasil Pendataan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				2. Tersedia Data tentang Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i> . B09: Monitoring Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan Final Reject		
				B12 Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B12 Laporan Evaluasi dan Dokumentasi	
40	Pembentukan SOPAP Layanan Kewarganegaraan berdasarkan Perundang-Undangan	Terbitnya SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan	Terlaksananya penerapan layanan Kewarganegaraan	B01: Rapat persiapan penyusunan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan. B02: 1. Pembentukan Tim penyusunan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan; 2. Penyusunan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan. B03: Penyusunan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan B04: Konsinyering pembahasan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan. B05: Penerbitan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan	B01: Laporan rapat B02: 1. SK Tim 2. Rancangan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan B03: Rancangan SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan. B04: Laporan Kegiatan Konsinyering B05: SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan	DIT. IZIN TINGGAL

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06: Internalisasi kepada seluruh petugas di bidang layanan izin tinggal keimigrasian terkait SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan</p> <p>B07: Implementasi terkait SOPAP tentang Layanan Kewarganegaraan.</p> <p>B08: Monitoring dan evaluasi ke kantor Imigrasi</p> <p>B09: Monitoring dan evaluasi ke kantor Imigrasi</p>	<p>B06: Laporan internalisasi kepada seluruh petugas di bidang layanan izin tinggal keimigrasian.</p> <p>B07: Laporan Implementasi SOPAP tentang layanan Kewarganegaraan.</p> <p>B08: Laporan hasil monitoring dan evaluasi ke kantor imigrasi.</p> <p>B09: Laporan hasil monitoring dan evaluasi ke kantor imigrasi.</p>	
41	Meningkatnya implementasi hasil kerja sama keimigrasian	Dokumen penyusunan, implementasi, dan evaluasi hasil kerja sama keimigrasian	Meningkatnya implementasi hasil kerja sama keimigrasian	<p>B02: 1. Penjajakan kerja sama keimigrasian 2. Penataan perjanjian kerja sama keimigrasian (Fase penjajakan kerja sama keimigrasian, bisa ke seluruh subdit tidak hanya terbatas pada subdit kerja sama antarlembaga)</p>	<p>B02: 1. Laporan penataan perjanjian kerja sama keimigrasian 2. Laporan kegiatan penjajakan, implementasi, atau evaluasi kerja sama keimigrasian</p>	DIT. KERMA

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06: 1. Pembahasan perjanjian kerja sama keimigrasian 2. Implementasi pelaksanaan kerja sama keimigrasian 3. Koordinasi penataan perjanjian kerja sama keimigrasian (Fase pembahasan bentuk kerja sama keimigrasian)</p>	<p>B06: 1. Laporan koordinasi perjanjian kerja sama keimigrasian 2. Laporan kegiatan pembahasan, implementasi atau evaluasi kerja sama keimigrasian</p>	
				<p>B09: 1. Implementasi pelaksanaan kerja sama keimigrasian 2. Sosialisasi penataan perjanjian kerja sama keimigrasian (Fase penandatanganan ataupun implementasi hasil kerja sama keimigrasian)</p>	<p>B09: 1. Laporan koordinasi perjanjian kerja sama keimigrasian 2. Laporan kegiatan implementasi atau evaluasi kerja sama keimigrasian</p>	
				<p>B12: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama keimigrasian (Fase monitoring dan evaluasi hasil kerja sama keimigrasian)</p>	<p>B12: Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama Keimigrasian</p>	
42	Pembangunan Sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	1. <i>Proof of Concept</i> Kajian Sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	1. Presensetasi <i>Principle-principle</i> Sistem <i>Big Data</i> Tahap 2 2. Kajian <i>Design Thinking</i> Sistem 3. Penetapan Penyedia	B03: 1. Identifikasi metode pengembangan Sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2 2. <i>Profiling</i> Kebutuhan. 3. Rapat Komparasi berbagai metode pengembangan Sistem <i>Big Data</i> Tahap 2; 4. Rekomendasi Metode pengembangan Sistem <i>Big Data</i> Tahap 2.	B03 1. SK Tim 2. Dokumen Kajian <i>Big Data</i>	DIT. SISTIK

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06: Penetapan penyedia Pengembangan Sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	B06: Dokumen Penetapan	
		2. Proses Pengembangan Sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	1. Penyusunan Desain Sistem <i>Big Data</i> Tahap 2 (<i>mockup</i>);	B09: 1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam pengembangan Sistem; 2. Terbentuknya Desain Sistem <i>Big Data</i> Tahap 2.	B09: 1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Desain.	
			2. Pembangunan infrastuktur	B09: 1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam pengembangan Sistem; 2. Terbentuknya Infrastruktur.	B09: 1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Infrastruktur	
			3. Pembangunan <i>Source code</i> .	B09: 1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam pengembangan Sistem; 2. Terbentuknya <i>Source Code</i> .	B09: 1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Desain.	
		3. Proses Evaluasi sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	Evaluasi sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	B12: 1. Pelaksanaan Evaluasi sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2 2. Tindak lanjut hasil Evaluasi sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	B12: Dokumen evaluasi sistem <i>Big Data</i> Keimigrasian Tahap 2	
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL						
43	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/ <i>Stakeholder</i> terkait/MPIG dalam bentuk <i>Mobile IP Clinic</i>	Inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan	B01 : 1. Penyusunan konsep One Village One Brand 2. Pelaksanaan sosialisasi OVOB pada Kanwil" B02 : Penyusunan Rencana Pendampingan OVOB"	B01 : Laporan 1. konsep pelaksanaan OVOB 2. Sosialisasi OVOB pada Kanwil" B02 : Laporan Rencana Kegiatan/Timeline OVOB	DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek	B03 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ <i>Workshop</i> pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B03 : Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ <i>Workshop</i> pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B05 : Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B06 : -	B06 : -	
				B07 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ <i>Workshop</i> pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B07 : Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B08 : -	B08 : -	
				B09 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ <i>Workshop</i> pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B09 : Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B10 : Inventarisasi OVOB dan IG serta penyusunan strategi pemanfaatan merek	B10 : Laporan Inventarisasi	
				B11 : Evaluasi pelaksanaan kegiatan	B11 : Laporan Evaluasi	
				B12 : -	B12 : -	
44	Pelaksanaan audit dan penerapan ISO 9001 : 2015 pada layanan permohonan	Pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada layanan kekayaan	Sertifikasi ISO 9001:2015	B01 : Menyusun Tim Kerja Penerapan ISO 9001 : 2015	B01 : SK Tim Kerja Penerapan ISO 9001 : 2015	SEKRETARIAT DITJEN KI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
	kekayaan intelektual	intelektual		B02 : Evaluasi persiapan ISO 9001 : 2015	B02 : Dokumen Rencana kegiatan dan waktu penyelesaian data dukung	
				B03 : Pelaksanaan <i>Training</i> Audit Internal dalam rangka pemenuhan ISO 9001 : 2015	B03 : Laporan <i>Training</i> dan Laporan Struktur Manajemen	
				B04 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B04 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	
				B05 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B05 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	
				B06 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B06 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	
				B07 : Evaluasi persiapan audit penerapan ISO 9001 : 2015	B07 : Laporan Evaluasi persiapan	
				B08 : <i>Kickoff</i> pelaksanaan audit penerapan ISO 9001 : 2015 di layanan Kekayaan Intelektual	B08 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
				B09 : -	B09 : -	
				B10 : Rangkaian audit penerapan ISO 9001 : 2015	B10 : Laporan progres audit	
				B11 : Evaluasi hasil audit 9001 : 2015 pada layanan KI	B11 : laporan hasil evaluasi dan penerapan ISO 9001 : 2015 di layanan KI	
				B12 : -	B12 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
45	Pengelolaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik (hak cipta, paten, desain industri, merek)	Pengelolaan/ Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik	Pengelolaan atas 6 Aplikasi: 1. Aplikasi Merek 2. Aplikasi Hak Cipta 3. Aplikasi DI 4. Aplikasi Paten 5. Aplikasi KI Komunal 6. Aplikasi IG 7. Aplikasi Aduan Perkara	B01 : -	B01 : -	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI
				B02 : -	B02 : -	
				B03 : 1. Penerbitan SK Tim Pembahasan Aplikasi 2. Rapat koordinasi dengan unit teknis/Kantor Wilayah/ <i>Stakeholder</i> 3. Persiapan Peningkatan Kapasitas Teknis Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	B03 : 1. SK Tim Pembahasan Aplikasi 2. Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat, Dokumentasi Foto 3. Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis KI bidang TI pada Kantor Wilayah	
				B04 : -	B04 :	
				B05 : -	B05 :	
				B06: 1. Koordinasi/ Pendampingan Teknis /Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/Kantor Wilayah/ <i>Stakeholder</i> 2. <i>Troubleshooting</i> /uji testing aplikasi 3. Pelaksanaan <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis KI Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	B06 : 1. Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis/ Asistensi/Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/ <i>Stakeholder</i> dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto 2. <i>Troubleshooting</i> /uji testing aplikasi 3. Laporan <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis KI di Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: 1. Koordinasi/Pendampingan Teknis/Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/Kantor Wilayah/ <i>Stakeholder</i> 2. <i>Troubleshooting</i> /uji testing aplikasi 3. Pelaksanaan <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis KI Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	B09: 1. Hasil Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis/ Asistensi /Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/ <i>Stakeholder</i> dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto 2. Laporan <i>Troubleshooting</i> /uji testing aplikasi 3. Laporan <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis KI di Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	
				B10 : -	B10 : -	
				B11 : -	B11 : -	
				B12: 1. Koordinasi/Pendampingan Teknis/Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/ <i>Stakeholder</i> 2. Evaluasi <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis KI di bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah 3. Rencana Layanan Aplikasi Tahun 2024	B12: 1. Hasil Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis /Asistensi/Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/ <i>Stakeholder</i> dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto 2. Laporan Evaluasi <i>Sharing Knowledge</i> Peningkatan Kapasitas Teknis di Bidang TI pada Kantor Wilayah 3. KAK Layanan Aplikasi Tahun 2024 disertai RAB	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
46	Pengelolaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik (hak cipta, paten, desain industri, merek)	Pengelolaan/ Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik	Pemanfaatan IP <i>Marketplace</i> di Indonesia	B01 : -	B01 : -	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI
				B02 : -	B02 : -	
				B03: 1. Tim terkait Pemanfaatan IP <i>Marketplace</i> 2. Rapat Koordinasi/Pendampingan/ <i>Workshop</i> IP <i>Marketplace</i> dengan unit teknis/Kantor Wilayah/ <i>Stakeholder</i>	B03: 1. SK Tim Terkait Pemanfaatan IP <i>Marketplace</i> 2. Notula Rapat Koordinasi/Laporan Pendampingan/Laporan <i>Workshop</i> IP <i>Marketplace</i>	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	
				B06: 1. Peningkatan Kapasitas Teknis SDM IP <i>Marketplace</i> pada Kantor Wilayah/ <i>Stakeholder</i> 2. Reviu Aplikasi IP <i>Marketplace</i>	B06: 1. Laporan Peningkatan Kapasitas Teknis SDM terkait IP <i>Marketplace</i> 2. Laporan Reviu Aplikasi IP <i>Marketplace</i> "	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09: Pemutakhiran Aplikasi IP <i>Marketplace</i>	B09: Persiapan Pemutakhiran Aplikasi IP <i>Marketplace</i> "	
				B10 : -	B10 : -	
				B11 : -	B11 : -	
				B12: Pemutakhiran Aplikasi IP <i>Marketplace</i>	B12: Update Aplikasi IP <i>Marketplace</i>	
47	Meningkatkan Standar Kualitas Layanan KI Berbasis Elektronik	Dokumen Rencana ISO 27000 dan ISO 20000-1	Terpenuhinya 1 dokumen Rencana	B01 : -	B01 : -	
				B02 : -	B02 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
	melalui Reviu ITMP, Sertifikasi 'ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI		ISO 27000 dan ISO 20000-1	B03: 1. Penerbitan SK Tim Dokumen Teknologi Informasi meliputi Reviu ITMP, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI 2. Inventarisasi kebutuhan Reviu ITMP, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI"	B03: 1. SK Tim Dokumen Teknologi Informasi 2. Daftar Inventarisasi Kebutuhan "	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	
				B06: Peningkatan Kapasitas Teknis SDM Reviu ITMP, Sertifikasi ISO 27001	B06: Laporan Peningkatan Kapasitas Teknis SDM	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09: Peningkatan Kapasitas Teknis SDM Sertifikasi ISO 20000-1"	B09: Laporan Peningkatan Kapasitas Teknis SDM"	
				B10 : -	B10 : -	
				B11 : -	B11 : -	
				B12: 1. Penyusunan Dokumen Reviu ITMP 2. Pelaksanaan Pemenuhan Dokumen ISO 27001 3. Pelaksanaan Pemenuhan Dokumen ISO 20000-1	B12: 1. Reviu ITMP 2020-2024 2. Laporan Kesiapan Dokumen ISO 27001 3. Laporan Kesiapan Dokumen ISO 20000-1"	
48	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 (Satu Wilayah Satu Kawasan Karya Cipta), dengan aksi	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas	1 dokumen rumusan kriteria kawasan karya cipta 2024	B01 : Penyusunan SK Tim Pokja Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta, Rapat Penyusunan	B01 : SK Tim Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta, Laporan Konsep Pelaksanaan	DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
	Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta.	Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku		Konsep Rumusan Kriteria Kawasan karya Cipta	Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta	
				B02 : Sosialisasi dengan Kantor Wilayah terkait konsep pelaksanaan KKC	B02 : Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B03 :	B03:	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	
				B06 : Perumusan Draft Kriteria Kawasan Karya Cipta	B06: Draft Rumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09 : Finalisasi Draft Rumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta	B09: Rumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta	
				B10 : -	B10 : -	
				B11 : Verifikasi data kandidat KKC	B11 : Laporan verifikasi kandidat KKC	
				B12 : Sosialisasi kepada kantor wilayah terkait kriteria kawasan karya cipta 2024	B12: Laporan dan Dokumentasi kegiatan sosialisasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
49	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku 100%	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku 100%	1. Hak Cipta 100% 2. DI 100% 3. Paten 100% 4. Merek 120.000	B01 : Penyelesaian permohonan Paten 100%	B01 : 1. Penyelesaian pemeriksaan formalitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan 100% 2. Permohonan paten yang diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 3. Permohonan paten yang telah diklasifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 4. Jumlah permohonan penelusuran paten yang telah diselesaikan 100% 5. Jumlah permohonan pemeriksaan substantif yang di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 6. Jumlah sertifikat paten dan DTLST yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 7. Jumlah paten yang dibayarkan biaya pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 8. Jumlah permohonan banding yang telah diputus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 9. Jumlah penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100%	DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT PATEN DTLST DAN RD
				B02 : -	B02 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 1 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 1 100% 3. Penyelesaian permohonan Paten 100%	B03 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 1 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 1	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	
				B06 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 2 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 2 100%	B06 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 2 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 2	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 1 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 1 100%	B09 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 3 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 3	
				B10 : -	B10 : -	
				B11 : -	B11 : -	
				B12 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 4 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 4 100%	B12 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 4 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 4	
50	Menyelenggarakan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah	Menyelenggarakan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah	Menyelenggarakan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (9 Daerah)	B01: Memetakan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha yang memiliki permohonan paten B02: Koordinasi internal pemeriksa paten B03: Koordinasi internal pemeriksa paten	B01: Daftar Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha yang memiliki permohonan paten B02: Notulensi Rapat B03: Notulensi Rapat	DIREKTORAT PATEN DTLST DAN RD

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: Koordinasi dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha	B04: Notulensi Rapat	
				B05: Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Jawa Timur dan Jawa Tengah)	B05: Laporan kegiatan	
				B06: Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Kalimantan Selatan dan Lampung)	B06: Laporan kegiatan	
				B07: Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan)	B07: Laporan kegiatan	
				B08: Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Bali dan Yogyakarta)	B08: Laporan kegiatan	
				B09: Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Jawa Barat)	B09: Laporan kegiatan	
				B10: Evaluasi kegiatan	B10: Hasil evaluasi kegiatan	
				B11:-	B11:-	
				B12:-	B12:-	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
51	Pemetaan Potensi KI Komunal di 10 Wilayah			B1 : Penyusunan tim pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KIK di 10 wilayah	B1 : SK TIM pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah 10	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KI
				B2 : Perencanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di wilayah	B2 : Laporan Perencanaan Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi KI Komunal di wilayah	
				B3 : Persiapan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di wilayah	B3 : Laporan perencanaan dan persiapan	
				B4 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B4 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	
				B5 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B5 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	
				B6 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B6 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	
				B7 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan/ papua/ maluku	B7 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sulawesi/Kalimantan/Papua/Maluku 2. Daftar KI komunal	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B8 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan/ papua/ maluku</p> <p>B9 : Pelaksanaan pemetaan potensi konomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan/ papua/ maluku</p> <p>B10 : Monitoring dan Evaluasi daftar KI komunal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya</p> <p>B11 : Inventarisasi Pelaksanaan Kegiatan KI komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya</p> <p>B12 : -</p>	<p>B8 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan/ papua/ maluku</p> <p>B9 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sulawesi/Kalimantan/Papua/Maluku 2. Daftar KI komunal</p> <p>B10 : Laporan rekomendasi daftar KI Komunal sebagai ekonomi kreatif di wilayah tahun 2022</p> <p>B11 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan KI Komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya</p> <p>B12 : -</p>	
52	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional	Telaksananya sertifikasi pusat belanja berbasis KI dan Monevnya	<p>B01:-</p> <p>B02: Mempersiapkan daftar pusat perbelanjaan yang akan dilakukan sertifikasi . Persiapan pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dengan ruang lingkup Kab/Kota dan pusat perbelanjaan</p>	<p>B01:-</p> <p>B02: Laporan daftar pusat perbelanjaan yang akan dilakukan sertifikasi</p>	DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah...	B03: Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	
				B04: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah...	B04: Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	
				B05: -	B05: -	
				B06: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah...	B06: 1. Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan 2. Laporan monitoring pelaksanaan sertifikasi wilayah...	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah	B07: 1. Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan 2. Laporan monitoring pelaksanaan sertifikasi wilayah	
				B08: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah	B08: 1. Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan 2. Laporan monitoring pelaksanaan sertifikasi wilayah	
				B09:-	B09:	
				B10: 1. Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. 2. Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah	B10: 1. Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan 2. Laporan monitoring pelaksanaan sertifikasi wilayah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	B11: Laporan pelaksanaan monev pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	
				B12; Laporan pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024	B12: Laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2023 dan rencana kerja 2024	
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
53	Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara digital	Implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara digital melalui aplikasi e-pengundangan, dan e-partisipasi publik	B01: 1. Penetapan SK Tim 2. Rapat Persiapan Tim	B01: 1. SK Tim 2. Dokumentasi rapat Persiapan (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula)	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
				B02 1. Rapat Persiapan Sosialisasi aplikasi e-pengundangan 2. Sosialisasi penerapan aplikasi e-partisipasi publik Internal Ditjen PP	B02 1. Dokumen kegiatan rapat persiapan Sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notula) 2. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula)	
				B03 1. Rapat Persiapan Sosialisasi aplikasi e-pengundangan 2. Sosialisasi penerapan aplikasi e-partisipasi publik Internal Ditjen PP	B03 1. Dokumen kegiatan rapat persiapan Sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notula) 2. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 1. Sosialisasi penerapan aplikasi e- undangan kementerian/lembaga 2. Sosialisasi penerapan aplikasi e-partisipasi publik kementerian/lembaga/pemda	B04 1. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula) 2. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula)	
				B05 1. Sosialisasi penerapan aplikasi e- undangan kementerian/lembaga 2. Sosialisasi penerapan aplikasi e-partisipasi publik kementerian/lembaga/pe mda secara virtual	B05 1. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula) 2. Dokumen kegiatan sosialisasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula)	
				B06 Penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik	B06 Laporan penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik (Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi)	
				B07 Penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik	B07 Laporan penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik (Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi)	
				B08 Penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik	B08 Laporan penerapan aplikasi e- undangan dan e-partisipasi publik (Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik	B09 Laporan penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik (Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi)	
				B10 Penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik	B10 Laporan penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik (Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi)	
				B11 Evaluasi Penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik	B11 Dokumen kegiatan evaluasi (Undangan, daftar hadir, dokumentasi notula)	
				B12 Penyusunan Laporan Penerapan aplikasi e-pengundangan dan e-partisipasi publik	B12 Laporan sesuai tata naskah dinas dengan melampirkan capture aplikasi	
54	Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyelenggaraan Pembinaan Perancang melalui Peningkatan Kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terbinanya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui Peningkatan Kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang	B01: 1. Rapat Persiapan 2. Penyusunan materi kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	B01: 1. Dokumentasi rapat Persiapan 2. Konsep Materi Kegiatan	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			Peraturan Perundang-Undangan	B02 1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2. Koordinasi pembicara materi kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	B02 1. Dokumentasi rapat pelaksanaan kegiatan (undangan, notula, daftar hadir) 2. Surat Tugas Koordinasi ke BPSDM Hukum dan HAM	
				B03 Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Ditjen PP	B03 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan meliputi: a. undangan; b. notula; c. daftar hadir; d. surat permohonan narasumber untuk narasumber yang berasal dari BPSDM Hukum dan HAM; e. surat tugas untuk narasumber yang berasal dari Ditjen PP	
				B04 Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	B04 : Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan	
				B05 Penyusunan laporan kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	B05 Laporan kegiatan peningkatan kapasitas Perancang dalam Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA						
55	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75% Pusat	75 % Kementerian/ Lembaga dan melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	B01 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategis monitoring dan evaluasi RANHAM sebagai Prioritas Nasional	B01 : 1. SK Tim Koordinasi Strategis monitoring dan evaluasi RANHAM sebagai Prioritas Nasional. 2. Surat Undangan Rapat Persiapan 3. Rekrutmen Konsultan RANHAM 4. Notula	Direktorat Kerja Sama HAM
56	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target	45% Daerah	45 % Pemerintah Daerah Melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	2. Persiapan Rekrutmen Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM	B02 : 1. Surat Undangan Penajaman Aksi HAM K/L (Pra Penajaman <i>Online</i> *pelaksanaan direkomendasikan untuk persiapan rapat penajaman*) 2. Notula 3. SK Penunjukan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RAHAM	
				B02 : 1. Penajaman Aksi HAM K/L 2. Tersedianya Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM	B03 : 1. Surat Undangan Penajaman Aksi HAM K/L 2. Notula 3. Aksi HAM dan Target Capaian K/L 4. Berita Acara Pendampingan dan Konsultasi	
				B03: 1. Penajaman Aksi HAM K/L 2. Pendampingan dan Konsultasi Aksi HAM K/L/D	B04 : 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 untuk K/L/D 2. Undangan 3. ToR 4. Daftar Hadir 5. Notula	
				B04 : 1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 untuk K/L/D 2. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B04		

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B05 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Pedoman Pelaporan Aksi HAM Daerah (Persiapan pelaporan B08) 2. Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B04 	<p>B05 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bimtek Pedoman Pelaporan Aksi HAM Daerah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Undangan/Surat Tugas b. Bahan paparan c. Notula d. Dokumentasi 2. Laporan Pelaksanaan Aksi HAM K/L/D B04 3. Daftar Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B04 	
				<p>B06:</p> <p>Penyusunan dokumen capaian B04 Aksi HAM K/L/D</p>	<p>B06 :</p> <p>Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B04 K/L/D</p>	
				<p>B07 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B04 2. Monitoring Capaian Target Aksi HAM 	<p>B07 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan 2. ToR 3. Daftar Hadir 4. Notula 5. Daftar Masalah Pelaporan Aksi HAM 	
				<p>B08 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 untuk K/L/D 2. Pendampingan dan Konsultasi Aksi HAM K/L/D 	<p>B08 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 untuk K/L/D 2. Berita Acara Pendampingan dan Konsultasi 	
				<p>B09:</p> <p>Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B08</p>	<p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Aksi HAM K/L/D B08 2. Daftar Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B08 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10 : 1. Penyusunan dokumen capaian B08 Aksi HAM K/L/D 2. Monitoring Capaian Target Aksi HAM	B10 : 1. Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B08 K/L/D 2. Daftar Masalah Pelaporan Aksi HAM	
				B11 : 1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 untuk K/L/D 2. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B12	B11 : 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 untuk K/L/D 2. Undangan 3. Daftar Hadir 4. Notula	
				B12: 1. Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B12 2. Penyusunan dokumen capaian B12 Aksi HAM K/L/D 3. Rapat persiapan penyusunan laporan Presiden Aksi HAM 2022	B12 : 1. Laporan : a. Pelaksanaan Aksi HAM K/L/D B12 b. Daftar Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B08 2. Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B12 K/L/D - Undangan - Daftar Hadir - Notula 3. Laporan Presiden Aksi HAM 2022	
57	Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia kepada unsur-unsur masyarakat dan instansi Pemerintah	Jumlah unsur masyarakat dan instansi Pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	1. 50% Jumlah unsur masyarakat yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia dan	B01: 1. Evaluasi bahan/instrumen Diseminasi 2. Dapat penyusunan bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	B01: 1. Laporan Hasil Evaluasi bahan/instrumen Diseminasi 2. Laporan hasil rapat penyusunan bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			2. 50% instansi Pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	B02: 1. Pembentukan Tim Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia 2. Inventarisasi Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	B02: 1. Surat Keterangan Tim Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia 2. Hasil Inventarisasi Bahan /instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	
		B03: Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia		B03: Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia		
		B04: 1. Ujicoba Bahan/instrumen Diseminasi 2. Diseminasi Dan Penguatan HAM		B04: 1. Laporan Hasil Ujicoba Bahan/instrumen Diseminasi 2. Laporan hasil Diseminasi Dan Penguatan HAM 3. Laporan Pemantauan, Evaluasi, pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi		
		B05: 1. Ujicoba Bahan/instrumen Penguatan HAM 2. Diseminasi Dan Penguatan HAM		B05: 1. Laporan Hasil Ujicoba Bahan/ instrumen Penguatan HAM 2. Laporan hasil Diseminasi Dan Penguatan HAM 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi		
		B06: Diseminasi dan penguatan HAM		B06: Laporan hasil diseminasi dan penguatan HAM		
		B07: Diseminasi Dan Penguatan HAM		B07: Laporan Diseminasi Dan Penguatan HAM		

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Diseminasi Dan Penguatan HAM	B08: Laporan Diseminasi Dan Penguatan HAM	
				B09: Rapat Perumusan kebijakan pemantauan, dan evaluasi diseminasi dan penguatan HAM	B09 : Laporan Hasil Perumusan	
				B10: Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	B10: Laporan Pemantauan, Evaluasi, pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	
				B11: Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	B11: Laporan Pemantauan, Evaluasi, pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	
				B12: Penyusunan Evaluasi dan Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	B12: Laporan Hasil Penyusunan Evaluasi dan Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	
58	Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75% Jumlah instansi yang mendapat predikat Unit Kerja P2HAM	B01: Inventarisasi Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap perancangan P2HAM	B01: Data rekapitulasi hasil Inventarisasi Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap perancangan P2HAM	Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM
				B02: Persiapan pelaksanaan pendampingan dalam rangka tahap pembangunan pelayanan publik berbasis HAM	B02: Laporan persiapan pelaksanaan pendampingan	
				B03: Terlaksananya pendampingan dalam rangka tahap pembangunan pelayanan publik berbasis HAM	B03: Laporan hasil Pendampingan pelayanan publik berbasis HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: Pelaksanaan Persiapan tahapan Evaluasi pelayanan publik berbasis HAM	B04: Laporan Persiapan tahap Evaluasi pelayanan publik berbasis HAM	
				B05: Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	B05: Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	
				B06: Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	B06: Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan Diseminasi pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	
				B07: Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	B07: Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	
				B08: Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	B08: Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	
				B09: Persiapan tahap penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	B09: Laporan Persiapan tahap penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	
				B10: 1. Pembentukan Tim Penilai P2HAM 2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengisian kriteria integritas	B10: 1. Surat Keputusan Tim Penilai P2HAM 2. Data terkait kriteria integritas	
				B11: Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	B11: 1. Laporan pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM 2. Rekapitulasi awal hasil penilaian Unit kerja P2HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12 : Pelaksanaan pemberian predikat Unit Kerja P2HAM	B12 : 1. Rekapitulasi akhir hasil penilaian unit kerja P2HAM 2. Surat Keputusan penetapan unit kerja P2HAM	
59	Hasil Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM yang ditindaklanjuti	Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti	90% Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM yang ditindaklanjuti	B01 : 1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan; 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM; 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM.	B01 : Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berperstif HAM (Matriks).	Direktorat Instrumen HAM
				B02 : 1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan; 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM; 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM.	B02 : Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berperstif HAM (Matriks).	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 : 1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan; 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM; 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM.	B03 : Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berpersitif HAM (Matriks).	
				B04 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang- undangan berperspektif; 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM	B04 : Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi)	
				B05 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berperspektif; 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang- undangan berperspektif HAM.	B05 : Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berperspektif; 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang- undangan berperspektif HAM.	B06 : Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi)	
				B07 : 1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Rapat analisis dari perspektif HAM; 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	B07 : 1. Laporan hasil analisis peraturan perundang- undangan yang berperspektif HAM (dokumen); 2. Laporan Rekomendasi Analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (dokumen)	
				B08 : 1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Rapat analisis dari perspektif HAM; 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	B08 : 1. Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (dokumen); 2. Laporan Rekomendasi Analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (dokumen)	
				B09 : 1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Rapat analisis dari perspektif HAM; 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	B09 : 1. Laporan hasil analisis peraturan perundang- undangan yang berperspektif HAM (dokumen); 2. Laporan Rekomendasi Analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM (dokumen)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat); 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat). 	<p>B10 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. 	
			<p>B11 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat); 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat). 	<p>B11 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. 		
			<p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM; 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat); 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat). 	<p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. 		
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL						
60	Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan	Tersusunnya rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang- undangan mengenai aparat penegak hukum	Tersampainya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan kepada K/L terkait	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 2. Penyusunan draft SK 3. Identifikasi permasalahan Inventarisasi 	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Permasalahan 2. Daftar inventarisasi peraturan perundang- undangan yang akan dianalisis 3. Draft SK 	Pusanev
				<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan proposal 2. SK Pembentukan Pokja 	<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Pokja AE 2. Surat Keputusan (SK) Kepala Badan tentang Pembentukan Pokja 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03: 1. Pembahasan isu krusial 2. Analisis awal	B03: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 2. Bahan dan data awal permasalahan objek analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	
				B04: 1. Pembahasan Analisis dengan pedoman 2. Pendapat Ahli	B04: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 2. Materi Narasumber Pokja 3. Matrik analisis awal 4. SK Narasumber	
				B05: Terhimpunnya Pendapat Pemangku Kepentingan (Pemerintah Daerah)	B05: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 2. SK Kegiatan 3. Prosiding kegiatan 4. Materi Narasumber	
				B06: Tanggapan/masukan dari K/L terkait	B06: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi. 2. Materi Narasumber Pokja 3. Prosiding kegiatan 4. SK Narasumber	
				B07: Matriks hasil pendalaman analisis	B07: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 2. Materi Narasumber 3. SK Narasumber 4. Matriks hasil pendalaman analisis	
				B08: Pembahasan draft rekomendasi hasil analisis dan evaluasi	B08: 1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi. 2. SK Pelaksanaan Kegiatan 3. Draft final rekomendasi hasil analisis dan evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Tersusunnya Draft Laporan Akhir	B09: Draft Laporan Akhir	
				B10: Tersusunnya Laporan Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi	B10: Laporan Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi	
				B11: Penyampaian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi ke K/L	B11: Surat Penyampaian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi ke K/L	
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM						
61	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema Pemulihan Ekonomi Nasional	Tersusunnya laporan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema Pemulihan Ekonomi Nasional	B03: 1. Sosialisasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan bersama UKE I Kemenkumham 2. Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 3. Identifikasi dan Penetapan Populasi dan Sampel Kebijakan bersama UKE I Kemenkumham 4. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahapan agenda setting	B03: 1. Dokumen Sosialisasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (undangan, notula rapat, daftar hadir, dan foto) bersama UKE I Kemenkumham 2. Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 3. Laporan Identifikasi dan Penetapan Populasi dan Sampel Kebijakan bersama UKE I Kemenkumham 4. Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahapan agenda setting	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan 2. Pembahasan hasil penilaian sementara Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan 2. Laporan hasil penilaian sementara Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 	
				<p>B07:</p> <p>Penginputan data dukung pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada aplikasi Indeks Kualitas Kebijakan Nasional</p>	<p>B07:</p> <p>Bukti penginputan Data dukung pengukuran Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada aplikasi Indeks Kualitas Kebijakan Nasional</p>	
				<p>B09:</p> <p>Evaluasi hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>B09:</p> <p>Laporan Evaluasi hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	
62	Terwujudnya Indeks Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum	Tersusunnya Laporan Hasil Pengukuran Indeks Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim indeks pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Koordinasi substansi pengukuran layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 3. Penyusunan Proposal 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim 2. Undangan, Absensi, Notula rapat, dan Dokumentasi kegiatan koordinasi 3. Proposal 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06: 1. Penyusunan variabel dan indikator Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Penyusunan modul survei indeks Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 3. Pengujian instrumen serta modul survei indeks Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	B06: 1. Variabel dan Indikator Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Laporan penyusunan modul survei indeks Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 3. Laporan pengujian instrumen serta modul survei indeks Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	
				B09: 1. Pelaksanaan pengumpulan data survei indikator Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Analisis data hasil survei Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 3. Perumusan Rekomendasi hasil survei Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	B09: 1. Laporan pelaksanaan pengumpulan data survei indikator Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Laporan analisis data survei Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 3. Rekomendasi hasil survei layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	
				B12: 1. Diseminasi hasil survei Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum 2. Pengukuran pemanfaatan rekomendasi hasil survei layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	B12: 1. Laporan Diseminasi hasil survei Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum (Undangan, Absensi, Notula rapat, Dokumentasi) 2. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rekomendasi hasil survei layanan di bidang Administrasi Hukum Umum	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
63	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (280 orang/ 7 Angkatan)	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh Peserta Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Lulus sesuai standar penilaian Alumni Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat/ melaksanakan tugas menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Pertama 	85% Alumni Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diangkat/menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Kompetensi Bidang tugasnya	B03: Penyusunan SK Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan	B03: SK Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungham
				B06: Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Angkatan I, II dan III (120 Orang)	B06: Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I, II dan III	
				B09: Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Angkatan IV (40 Orang)	B09: Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV	
				B12: Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Angkatan I, II dan III (120 Orang)	B12: Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I, II dan III	
64	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Telah tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Tersedianya <ol style="list-style-type: none"> SK TIM Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda 1 (satu) Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda 16 (enam belas) Modul Pelatihan Fungsional Analis 	B01: Penetapan SK TIM Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	B01: SK TIM Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungham
				B02: Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	B02: RBPP dan RBPMP Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	
				B03: Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	B03: Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			Hukum Ahli Muda	B06 : Penyusun Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	B06: Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	
				B09: Penyusun Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	B09: Penyusun Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	
				B12: Modul akan di ajukan kepada Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan <i>International Standar Book Number</i> (ISBN).	B12: Modul mendapatkan <i>International Standar Book Number</i> (ISBN)	
65	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya (270 orang/ 9 angkatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikator hasil pembelajaran melalui tenaga pengajar yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, serta materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Tercapainya penyelenggaraan pelatihan yang mendukung terpenuhinya tujuan pelatihan 3. Terpenuhinya kebutuhan alumni untuk penanganan kasus-kasus ABH didalam SPPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 85% hasil evaluasi tenaga pengajar minimal kategori memuaskan dengan rentang nilai 80 sampai dengan 90 2. 85% hasil evaluasi materi pembelajaran minimal kategori memuaskan dengan rentang nilai 80 sampai dengan 90 3. 85% hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan minimal kategori memuaskan dengan rentang 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan SPPA 2. Penetapan SK Tim Penyelenggara Pelatihan Terpadu SPPA 3. Pelaksanaan Pelatihan SPPA Angkatan I dan II <p>B06: Pelaksanaan Pelatihan SPPA Angkatan III, IV dan V</p>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notula Rapat persiapan Penyelenggaraan Pelatihan SPPA dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelatihan SPPA 2. SK Tim Penyelenggara Pelatihan Terpadu SPPA 3. Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan I dan II beserta SK Pengajar dan SK Peserta Pelatihan <p>B06: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan III, IV dan V, beserta SK Pengajar dan SK Peserta Pelatihan</p>	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			<p>nilai 80 sampai dengan 90</p> <p>4. 85% peserta lulus mendapatkan sertifikat pelatihan</p>	<p>B09: Pelaksanaan Pelatihan SPPA Angkatan VI, VII, dan VIII</p> <p>B12: Pelaksanaan Pelatihan SPPA Angkatan IX</p>	<p>B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan VI, VII, dan VIII beserta SK Pengajar dan SK Peserta Pelatihan</p> <p>B12: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan SPPA Angkatan IX beserta SK Pengajar dan SK Peserta Pelatihan</p>	
66	Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Peserta PKP, PKA dan PKN II yang berdampak pada kinerja individu dan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja alumni meningkat dan berdampak pada organisasi Aksi/proyek perubahan alumni termanfaatkan dan berkembang dalam mendukung kinerja organisasi 	85% alumni Pelatihan Kepemimpinan memenuhi kriteria keberhasilan	<p>B03: Penetapan SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</p> <p>B06: <ol style="list-style-type: none"> Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas </p> <p>B09: <ol style="list-style-type: none"> Penetapan SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator </p>	<p>B03: <ol style="list-style-type: none"> Notula Rapat SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas </p> <p>B06: <ol style="list-style-type: none"> Notula Rapat Laporan pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas </p> <p>B09: <ol style="list-style-type: none"> Notula Rapat SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator Laporan pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator </p>	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 1. Penetapan SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II 2. Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II 3. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	B12: 1. Notula Rapat 2. SK Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II 3. Laporan pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional	
67	Kamus Kompetensi Sub Indikator Kompetensi Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersusunnya kamus kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya kamus kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: Rapat Persiapan dan Membentuk Tim Penyusun/ Tim Pokja B06: Penyusunan Kamus Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM B09: Finalisasi Kamus Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM B12: Pelaporan Pelaksanaan Kamus Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: SK Tim Penyusun/ Tim Pokja B06: Draft Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM B09: SK Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kamus Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM B12: Laporan Kegiatan Kamus Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
68	Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	Tersusunnya Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	Tersedianya Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	B03 1. Pembuatan SK Tim dan SK Narasumber 2. Review hasil kajian Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	B03 1. SK Tim 2. SK Narasumber 3. Dokumen review	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi


No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			Pengembangan Kompetensi	B06 Pembahasan Draft Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	B06 Laporan Kegiatan	
				B09 Penyelarasan (konsinyering) draft Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	B09 Dokumen penyelarasan	
				B12 Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	B12 - Dokumen - Laporan evaluasi	
69	Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM melalui Publikasi Ilmiah	Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM seluruhnya memuat Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM	Tersusunnya 2 Volume Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM yang memuat 12 Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional	B03: Persiapan penulisan jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volume 9 No. 1	B03: Laporan Persiapan	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
				B06: Terbitnya Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volumen 9 No.1	B06: Dokumen Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volumen 9 No.1	
				B09: Persiapan penulisan jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volume 9 No. 2	B09: Laporan Persiapan	
				B12: Terbitnya Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volumen 9 No.2	B12: Dokumen Jurnal Widyaiswara Hukum dan HAM Volumen 9 No.2	
70	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen	Persentase Dosen Tetap Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Yang	Tercapainya Presentase 70% Kriteria Target Kinerja.	B03 Data Diri Dosen dan BKD Terinput Dalam Aplikasi Sister.	B03: Data Diri Dan BKD Dosen.	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Diakui Dunia Akademik/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.		B06 : Dosen Memiliki Sertifikasi TKDA dan TKBI. B09: Dosen Telah Memiliki Data Diri Tahap 1 sd 4. B12: Pengajuan Sertifikasi Dosen	B06: Sertifikat TKDA dan TKBI Dosen; B09: Dokumen D1 sd D4. B12: Dokumen Sertifikasi Dosen	
71	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Persentase Mata Kuliah Yang Memiliki Referensi Buku Ajar.	Tercapainya Presentase 20% Kriteria Target Kinerja	B03: Terbentuknya Surat Keputusan Direktur Tentang Tim Penyusun Buku Ajar B06 : Terbentuknya Bahan Materi Pokok Buku Ajar. B09: 1. Tersusunnya Draft Buku Ajar 2. Reviu Draft Buku Ajar B12: Terbitnya Buku Ajar	B03: Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Buku Ajar. B06 : Draft Materi Pokok Buku Ajar. B09: 1. Draft Buku Ajar 2. Hasil Reviu Draft Buku Ajar B12: Buku Ajar	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan
72	Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Pemasarakatan	Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan Sesuai Profil Kompetensi Lulusan	Terevaluasi Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan Sesuai dengan Profil Kompetensi	B03 Penyusunan Standar Instrumen Evaluasi Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan B06 : Pelaksanaan Evaluasi Alumni pada Unit Eselon I dan UPT Pada Kantor Wilayah Seluruh Indonesia.	B03 1. SK Tim Evaluasi Alumni Poltekip 2. Standar Instrumen Evaluasi Alumni B06: Data dan Informasi Hasil Evaluasi Alumni	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			Lulusan dan Kebutuhan Pengguna Lulusan	B09: Pengolahan Data dan Informasi Hasil Evaluasi Alumni	B09: Draft Laporan pelaksanaan Tugas Alumni Poltekip Ditempatkan sesuai Kompetensi Profil Lulusan di Bidang Pemasarakatan	
				B12: Rekomendasi Alumni Poltekip Ditempatkan sesuai Profil Kompetensi Lulusan di Bidang Pemasarakatan	B12: Laporan pelaksanaan Tugas Alumni Poltekip Ditempatkan sesuai Profil Kompetensi Lulusan di Bidang Pemasarakatan.	
73	Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik	Persentase Publikasi Ilmiah yang Dikeluarkan Oleh Dosen dan Peserta Didik	Tercapainya Presentase 70% Kriteria Target Kinerja	B03 Tersusunnya Proposal Penelitian/ Rencana Penelitian	B03 Proposal Penelitian	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan
				B06 : Pengambilan dan Pengolahan Data Penelitian/Bahan Publikasi Ilmiah	B06 Data Variabel Penelitian	
				B09: Tersusunnya Draft Publikasi Ilmiah Review Draft Publikasi Ilmiah	B09 Draft Publikasi Ilmiah Hasil Review Draft Publikasi Ilmiah	
				B12: Karya Ilmiah Siap Diterbitkan/Didaftarkan untuk Terbit	B12 Karya Ilmiah Siap / Telah Terbit	
74	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikas Dosen	Persentase Dosen Tetap Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Yang Diakui Dunia Akademik/ Kementerian	Tercapainya Presentase 70% Kriteria Target Kinerja.	B03 Data Diri Dosen dan BKD Terinput Dalam Aplikasi Sister.	B03: Data Diri Dan BKD Dosen.	Direktur Politeknik Imigrasi
				B06 : Dosen Memiliki Sertifikasi TKDA dan TKBI.	B06: Sertifikat TKDA dan TKBI Dosen;	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Pendidikan dan Kebudayaan.		B09: Dosen Telah Memiliki Data Diri Tahap 1 sd 4.	B09: Dokumen D1 sd D4.	
				B12: Pengajuan Sertifikasi Dosen	B12: Dokumen Sertifikasi Dosen	
75	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Persentase Mata Kuliah Yang Memiliki Referensi Buku Ajar.	Tercapainya Presentase 20% Kriteria Target Kinerja	B03: Terbentuknya Surat Keputusan Direktur Tentang Tim Penyusun Buku Ajar	B03: Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Buku Ajar.	Direktur Politeknik Imigrasi
				B06 : Terbentuknya Bahan Materi Pokok Buku Ajar.	B06 : Draft Materi Pokok Buku Ajar.	
				B09: 1. Tersusunnya Draft Buku Ajar 2. Reviu Draft Buku Ajar	B09: 1. Draft Buku Ajar 2. Hasil Reviu Draft Buku Ajar	
				B12: Terbitnya Buku Ajar	B12: Buku Ajar	
76	Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Imigrasi Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Keimigrasian	Alumni Politeknik Imigrasi yang ditempatkan Sesuai Profil Kompetensi Lulusan	Terevaluasi Alumni Politeknik Imigrasi yang ditempatkan Sesuai dengan Profil Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Pengguna Lulusan	B03 Penyusunan Standar Instrumen Evaluasi Alumni Politeknik Imigrasi	B03 1. SK Tim Evaluasi Alumni Poltekim 2. Standar Instrumen Evaluasi Alumni	Direktur Politeknik Imigrasi
				B06 : Pelaksanaan Evaluasi Alumni pada Unit Eselon I dan UPT Pada Kantor Wilayah Seluruh Indonesia.	B06: Data dan Informasi Hasil Evaluasi Alumni	
				B09: Pengolahan Data dan Informasi Hasil Evaluasi Alumni	B09: Draft Laporan pelaksanaan Tugas Alumni Poltekim Ditempatkan sesuai Kompetensi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					Profil Lulusan di Bidang Keimigrasian	
				B12: Rekomendasi Alumni Poltekim Ditempatkan sesuai Profil Kompetensi Lulusan di Bidang Keimigrasian	B12: Laporan pelaksanaan Tugas Alumni Poltekim Ditempatkan sesuai Profil Kompetensi Lulusan di Bidang Keimigrasian.	
77	Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik	Persentase Publikasi Ilmiah yang Dikeluarkan Oleh Dosen dan Peserta Didik	Tercapainya Presentase 70% Kriteria Target Kinerja	B03 Tersusunnya Proposal Penelitian/ Rencana Penelitian	B03 Proposal Penelitian	Direktur Politeknik Imigrasi
				B06 : Pengambilan dan Pengolahan Data Penelitian/Bahan Publikasi Ilmiah	B06 Data Variabel Penelitian	
				B09: Tersusunnya Draft Publikasi Ilmiah Review Draft Publikasi Ilmiah	B09 Draft Publikasi Ilmiah Hasil Review Draft Publikasi Ilmiah	
				B12: Karya Ilmiah Siap Diterbitkan/Didaftarkan untuk Terbit	B12 Karya Ilmiah Siap / Telah Terbit	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

 YASONNA H. LAOLY



TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIVISI ADMINISTRASI						
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022	Seluruh satker di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP secara utuh meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	B01 : Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil B02-B12 Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadir dan Ka UPT . B06: Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester I B12: 1.Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester II 2. Evaluasi Kinerja Mandiri	B01: 1. Renstra Kantor Wilayah dan UPT 2. Renja/RKKL Kanwil dan UPT 3. Dokumen PK secara berjenjang dari kanwil sampai dengan UPT B02-B12 Laporan e-performance [screenshot] B06: Dokumen Lkkip semester I B12 : Dokumen Lkkip semester II	DIV ADMIN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	1.Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	Nilai maturitas SPIP Kantor Wilayah dan satuan kerja pada level 3 (terdefinisi)	B01: Koordinasi dengan APiP Kumham	B01: Laporan Koordinasi	DIV ADMIN
				B02: Pelaksanaan <i>Workshop</i> (Bimtek)	B02: Laporan pelaksanaan <i>Workshop</i> (Bimtek)	
			B03: 1. Pembentukan TIM Penilaian SPIP Kanwil 2. Melakukan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	B03: 1. SK TIM Penilaian SPIP Kanwil dan 2. Laporan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja		
			B06 : Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	B06 : Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja		
			B09: Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	B09: Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja		
			B12: Analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	B12: Laporan analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja		
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Seluruh satuan kerja melakukan Mitigasi Risiko	B03: Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan MR	B03: : 1. Laporan Hasil Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Laporan hasil Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan MR	DIV ADMIN
				B06-B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B06-B09: Laporan Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Evaluasi Penerapan MR	B12: Evaluasi Penerapan MR	
3	Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat <i>clearance</i> dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi	Setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah 2. Satuan kerja melakukan analisis usulan revisi belanja modal sebelum diusulkan ke kanwil 	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan anggaran harus melalui persetujuan Kantor Wilayah 2. Laporan Analisis usulan revisi belanja modal Satuan kerja 	DIV ADMIN
			<p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah melakukan analisis terhadap revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i> 2. Membuat berita acara <i>clearance</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Kantor Wilayah mengusulkan seluruh revisi anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 	<p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan analisis terhadap usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i> 2. Membuat berita acara <i>clearance</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Laporan usulan seluruh revisi usulan anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 		
4	Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN	1.Meningkatnya jumlah aset tanah & bangunan yg tercatat dlm SIMAK	B03 : Identifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan	B03 : Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi asset	DIV ADMIN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			BMN sebanyak 70% 2. Bertambahnya sertifikat tanah dan bangunan yang merupakan BMN di lingkungan Kanwil sebesar 70%	B06 Koordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan sertifikasi tanah B09 : Monitoring dan Evaluasi B12 : Laporan Perubahan status aset pada SIMAK BMN	B06 : Laporan hasil koordinasi terkait pengusulan sertifikat tanah B09 : Laporan monitoring dan evaluasi B12 : Laporan Perubahan status aset BMN	
5	Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan di lingkungan Kantor Wilayah	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan	Setiap usulan dari kanwil terkait revitalisasi gedung dan bangunan telah dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan	B03 : 1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait kelayakan gedung dan bangunan 2. Penyusunan TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker 3. Pengajuan surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan	B03: 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR 2. TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker 3. Surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan	DIV ADMIN
6	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah	Termanfaatkannya aplikasi khusus Unit Utama di lingkungan Kanwil secara optimal (100%)	B03 : Inventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing B06 : Pemanfaatan aplikasi khusus dan penyesuaian aplikasi di wilayah ke Pusdatin	B03 : Laporan inventarisasi B06 : Dokumen verifikasi	DIV ADMIN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 : Monitoring dan Evaluasi	B09 : Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 : Laporan	B12 : Laporan pelaksanaan	
7	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya	Glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya setiap hari	B03-B09: 1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	B03-B09: 1. Daftar akun Satuan Kerja yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan Bulanan pelaksanaan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif	DIV ADMIN
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
8	Optimalisasi implementasi <i>Corporate University</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	1. Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i> 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)	Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i> (70% dari jumlah pegawai dilingkungan Kantor wilayah)	B03: 1. Pembentukan Tim Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 2. Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 3. Sosialisasi Sistem Informasi Corpu	B03: 1. SK Tim Pelaksana Corpu 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi	DIV ADMIN
				B06-B09 : 1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ <i>Workshop</i> /lokakarya	B06-B09 : 1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ <i>Workshop</i> /lokakarya 3. Evaluasi pelaksanaan Corpu	B12: 1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu 3. Laporan evaluasi pelaksanaan Corpu	
9	Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil	Proses digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil sebanyak 50%	B03 : 1. Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan 2. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	B03 : 1. Laporan Inventarisasi arsip manual yang akan digitalisasi 2. Laporan hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	DIV ADMIN
				B06-B09 : Melakukan digitalisasi arsip	B06-B09 : Laporan pelaksanaan digitalisasi arsip	
				B12 : Evaluasi arsip yang sudah didigitalisasi	B12 : Laporan hasil digitalisasi	
10	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan	1. Setiap triwulan kanwil melakukan evaluasi kinerja seluruh satker 2. Kanwil memberikan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik	B03: kanwil melakukan evaluasi capaian kinerja satker	B03 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	DIV ADMIN
				B06 : kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	B06 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	
				B09 : kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	B09 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10: 1.Penyusunan bahan rakor evaluasi tingkat kementerian 2. Pemberian penghargaan kepada satker berkinerja baik	B10: 1.Konsep Bahan Rakor Evaluasi Tingkat Kementerian 2. Piagam penghargaan kepada satker berkinerja baik	
				B12 : Evaluasi capaian kinerja	B12 : Dokumen hasil evaluasi capaian kinerja	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM						
11	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B02 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota</p>	<p>B02 Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p>	
				<p>B03 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota</p>	<p>B03 Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B04 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05 Terasiliasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B05 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B06 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07 Terasiliasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B07 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B08 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Terasiliasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B10 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B11 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B11 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	
				<p>B12 Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B12 Laporan Kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
12	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA. 2023	Tersusunnya Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA. 2023	B01: -	B01: -	DIV YANKUM
				B02: Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN.	B02: Surat Penyampaian Hasil Monev Administrasi Semester I 2022 dari BPHN.	
				B03: 1. Pemetaan Data Hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara faktual; 2. Penyampaian jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN.	B03: 1. Rapat Penentuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual (UANG) 2. Surat Pemberitahuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual	
				B04: -	B04: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap I	B05: 1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap I 2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap I	
				B06: -	B06: -	
				B07: Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap II	B07: 1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap II. 2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) Tahap II.	
				B08: Penyusunan Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA. 2023	B08: Rapat Finalisasi Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA. 2023 (UANG)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Penyampaian Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA. 2023.	B09: Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (<i>existing</i>) TA.2023 Catatan: Laporan sesuai TNDE	
				B10: -	B10: -	
				B11: -	B11: -	
				B12: -	B12: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	70% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B06: 20% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B06: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	DIV YANKUM
				B09: 40% (B06:20% + B09:20%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B09: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 70% (B09:40% + B12:30%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B12: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	
14	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum	80% rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	B03: 1. Pembentukan Tim 2. Penyusunan Proposal 3. Presentasi Proposal 4. Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022	B03: 1. SK TIM 2. Proposal 3. Laporan Kegiatan Presentasi Proposal (bahan presentasi, undangan, absensi, notula rapat, dan dokumentasi) 4. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi tahun 2022	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		dan Hak Asasi Manusia di wilayah		<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan 3. Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Laporan verifikasi data lapangan 3. Laporan Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Surat penyampaian dan Bukti capture penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 	
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode April – Juni 2023 (Triwulan II) 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 3. Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-November 2023 (Triwulan IV) 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 3. Laporan Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-Desember 2023 (Triwulan IV) 	
15	Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui	1. Tersosialisasikan tugas, fungsi, dan aplikasi PPNS kepada seluruh PPNS di	B01: Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah	B01: Laporan kegiatan koordinasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		<p>aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</p>	<p>wilayah; 2. Terintegrasinya data seluruh PPNS di Aplikasi PPNS; 3. Terlaksananya pelaporan seluruh kegiatan PPNS pada aplikasi (per triwulan / semester).</p>	<p>B02: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B02: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 80% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B03: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B03: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 90% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B04: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B04: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 95% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	B05: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	
				B06: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B06: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	
				B07: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B07: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B08: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	
				B09: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B09: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	
				B10: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B10: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B11: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)	
				B12: Evaluasi pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	B12: Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	
		2. Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)	Terlaksananya kegiatan penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah: a. Kewarganegaraan; b. Pewarganegaraan; c. Apostille; dan d. Perseroan Perorangan untuk 10% dari jumlah UKM di wilayah masing- masing.	B01-B02: 1. Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	B01-B02: Laporan persiapan dan koordinasi awal (Lampiran: surat undangan, daftar hadir/surat tugas, notula, dokumentasi foto) dan Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Januari 2022	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03-B05: Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	B03-B05: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)	
				B06-B08: Penyebaran informasi layanan Apostille	B06-B08: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Apostille (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)	
				B09-B11: Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	B09-B11: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)	
				B12: Evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan)	B12: 1. Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi); 2. Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Desember 2023	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
16	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP	Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris	B01: Pembentukan SK Tim	B01: SK TIM	DIV YANKUM
				B02: Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	B02: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko.	
				B03: Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	B03: Laporan kegiatan (lampiran: surat undangan, daftar hadir peserta, notula, tabel pemetaan (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022), dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06-B11: Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	B06-B11: 1. Surat Pengantar Audit Kepatuhan (Lampiran IV - Panduan Teknis Audit Kepatuhan); 2. Daftar Hadir Audit Kepatuhan; 3. Notula Kegiatan Audit Kepatuhan; 4. Dokumentasi Foto Kegiatan Audit Kepatuhan; 5. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Audit Kepatuhan; 6. Capture penyampaian seluruh data dukung via Sumaker yang terlampir dalam panduan teknis hingga tembusan laporan hasil audit kepatuhan kepada Subbagian Tata Usaha Direktorat Perdata cq. Subdit Notariat.	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B12: Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan evaluasi sekurang- kurangnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian dari pelaksanaan pengawasan; - Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; - Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023. 	<p>B12: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) tabel data pengisian kuesioner (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022 & Tahun 2023) dan tabel data Audit pengawas kepatuhan Tahun 2022 & Tahun 2023)</p>	
17	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil.	Adanya Data Notaris yang Akurat	<p>B01: Pembentukan Tim</p> <p>B02: Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base</p>	<p>B01: SK Tim</p> <p>B02: Data Notaris di Wilayah</p>	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B03: - Hasil pengecekan data : 25% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	
				<p>B06: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B06: - Hasil pengecekan data : 50% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 75% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B09: - Hasil pengecekan data : 75% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	
				<p>B11: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 100% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B11: - Hasil pengecekan data : 100% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Evaluasi Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	B12: Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, data sebelum dan sesudah dilakukan pengecekan & identifikasi status Notaris)	
18	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Diperolehnya alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<p>B01-B02: Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data</p> <p>B03-B04: Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p> <p>B05-B08: Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p> <p>B09-B11: Pengkajian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p>	<p>B01-B02: Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)</p> <p>B03-B04: Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)</p> <p>B05-B08: Laporan pengumpulan data (Laporan kegiatan, foto)</p> <p>B09-B11: Laporan pengkajian dan pendokumentasian data (laporan kegiatan, foto)</p>	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Evaluasi pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik	B12: Laporan hasil evaluasi (Laporan kegiatan, foto)	
19	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	B01-B03: Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	B01-B03: Laporan koordinasi persiapan tarja (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	DIV YANKUM
				B04-B08: Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B04-B08: Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah	
				B09-B11: Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B09-B11: Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah	
				B12: Evaluasi pelaksanaan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B12: Laporan hasil Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
20	Mendorong pertumbuhan permohonan merek <i>One Village One Brand</i> dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk <i>Mobile IP Clinic</i>	inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek	B01 : Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis <i>One Village One Brand</i>	B01 : laporan keikutsertaan koordinasi dan sosialisasi	DIV YANKUM
				B02: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, terkait: 1. Pemetaan atau inventarisasi potensi <i>One Village One Brand</i> dan IG 2. Persiapan pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> terkait sarana prasarana layanan HKI di wilayah	B02: laporan koordinasi potensi <i>One Village One Brand</i> atau laporan koordinasi rencana pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i>	
				B03: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B03: Laporan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B04: Laporan	
				B05: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B05: Laporan	
				B06: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B06: Laporan	
				B07 : 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B07: Laporan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B08: Laporan	
				B09: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B09: Laporan	
				B10: Inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG	B10: laporan hasil inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG	
				B11: 1. Evaluasi hasil inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i>	B11: laporan evaluasi hasil inventarisasi dan pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i>	
				B12: -	B12: -	
21	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS	Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah	B01 : - Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil. - Tindak lanjut dan penyusunan MoU/ PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023."	B01 : Laporan Evaluasi 2022	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Kanwil dengan stakeholder wilayah		<p>B02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanwil mengikuti koordinasi <i>Mobile IP Clinic</i> yang dilaksanakan oleh DJKI - Kanwil menyusun rencana pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek). - Kanwil Koordinasi dengan MIPG untuk penyempurnaan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis yang sudah diajukan sebelumnya." 	<p>B02: Laporan pelaksanaan kegiatan."</p>	
				<p>B03:</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP 2. <i>Mobile IP Clinic</i> - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP. 	<p>B03: Dokumen Laporan koordinasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: Inventarisasi layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC/ 1 tahun)	B04: Dokumen Laporan implementasi	
				B05: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B05: Dokumen Laporan implementasi	
				B06 : Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B06: Dokumen Laporan implementasi	
				B07: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B07: Dokumen Laporan implementasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08 : Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B08: Dokumen Laporan implementasi	
				B09: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B09: Dokumen Laporan implementasi	
				B10: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B10: Dokumen Laporan implementasi	
				"B11: -"	"B11: -"	
				B12: Pelaksanaan evaluasi MIC serta rencana kerja pelaksanaan implementasidi tahun 2024	B12: Dokumen Laporan dan evaluasi 2023	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
22	Persiapan Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	Kantor Wilayah bersama dengan stakeholder Melaksanakan mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan pedoman yang diberikan	Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria	B01 : -	B01 : -	DIV YANKUM
				B02: Mengikuti koordiasi persiapan Pemetaan Calon kawasan karya cipta dari DJKI	B02: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi	
				B03 : 1. Koordinsi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B03: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	
				B06: 1. Koordinsi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B06: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09: 1. Koordinsi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B09: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B10 : -	B10 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11: Verifikasi Data Kandidat KKC	B11: Hasil verifikasi kandidat KKC oleh DJKI dan Kanwil	
				B12: Penentuan kandidat kawasan karya cipta 2024	B12: Laporan usulan Kandidat KKC	
23	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	B01: Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B01: Daftar Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	DIV YANKUM
				B02: -	B02: -	
				B03: -	B03: -	
				B04: Koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD	B04: Laporan hasil koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD	
				B05: -	B05: -	
				B06: Pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B06: Laporan kegiatan	
				B07: Evaluasi kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B07: Laporan hasil evaluasi kegiatan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: -	B08: -	
				B09: -	B09: -	
				B10: -	B10: -	
				B11: -	B11: -	
				B12: -	B12: -	
24	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)	Terlaksananya sertifikasi pusat belanja dan monev sertifikasi pusat belanja berbasis KI	B01: -	B01: -	DIV YANKUM
				B02: -	B02: -	
				B03: Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	B03: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi	
				B04: -	B04: -	
				B05: -	B05: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06: Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional</p>	<p>B06: Laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	
				<p>B07: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan</p>	<p>B07: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	
				<p>B08: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan</p>	<p>B08: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B09: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	
				B10: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B10: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	
				B11: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B11: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional dan rencana kerja KI 2024	B12: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja	
25	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM	45 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	B01: Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	B01: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah	DIV YANKUM
				B02: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	B02: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM 2022	
				B03: Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	B03: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah	
				B04: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04	B04: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kab/Kota	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04	B05: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah	
				B06: Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	B06: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	
				B07: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B07: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B04 tahun 2022	
				B08: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08	B08: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B09: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08	B09: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B08	
				B10: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B10: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B08 tahun 2022	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12	B11: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B12: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12	B12: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B12	
26	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	25% instansi pemerintah yang mendapatkan kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM	B01 : Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B01 : Surat Notifikasi pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah	DIV YANKUM
				B02 : Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM	B02 : Dokumentasi dan notulensi	
				B03: Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B03 : Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 : Mengunggah dokumen Pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumham.go.id)	B04 : Berita Acara pengisian ke aplikasi (kkpham.kemenkumham.go.id)	
				B05 : Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM	B05 : Dokumen Rekap Pemda yang melaporkan dan tidak melaporkan KKP HAM	
				B06 : Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06 : Laporan hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	
				B07 : Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	B07 : Dokumentasi dan notulensi	
				B08 : Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	B08 : Berita acara hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	
				B09 – B12: -	B09 – B12: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
27	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50% Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	B01 : Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B01 : Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	DIV YANKUM
				B02 : Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B02 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	
				B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Tahun sebelumnya	B03 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	
				B04 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B04 : Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM pada Triwulan I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B05 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I	
				B06 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B06 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I	
				B07 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	B07 : Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM Semester I	
				B08 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	B08 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	B09 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I	
				B10 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari- September 2023	B10 : Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Januari-September 2023	
				B11 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III	B11 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.12 : 1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan	B.12 : 1. Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III; 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun berjalan	
DIVISI PEMASYARAKATAN						
28	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat dibidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka Overstaying Tahanan di Lapas dan Rutan	B.01 Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	DIV PAS
				B02 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	B02 Laporan Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B03 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B04 Melaksanakan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan	B04 Laporan Pelaksanaan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan	
				B05 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	B05 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B06 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B06 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B07 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B08 Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	B08 Laporan Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	
				B09 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B09 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B10 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B11 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
29	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	Terselenggara Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	B01 Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B01 SK Tim	DIV PAS
				B02 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B02 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B03 Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan	B03 Perjanjian Kerjasama / MOU	
				B04 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B04 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan	
				B05 Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B05 Laporan Supervisi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B06 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B07 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B07 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B08 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan	
				B09 Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B09 Laporan Supervisi	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan monitoring dan evaluasi	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan monitoring dan evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan monitoring dan evaluasi	
30	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	Penggunaan SDP dalam Tatakelola administrasi basan baran yang optimal	B01 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	DIV PAS
				B02 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B02 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B03 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B03 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B04 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B04 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B05 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B05 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B06 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B07 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B07 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B08 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B09 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B09 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
31	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi masyarakat	B.01: Penyampaian SK Direktur Jenderal Masyarakat tentang Penetapan UPT Masyarakat Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B.01: Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah.	DIV PAS
				B.02: Koordinasi Kesiapan UPT Masyarakat Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B.02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi	
				B.03: Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat ke UPT Masyarakat	B.03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan	
				B.04: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B.04: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	
				B.05: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B.05: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.06: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	B.06: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	
				B.07: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.07: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B.08: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.08: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B.09: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.09: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B.10: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.01-06)	B.10: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	
				B.11: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.07-09)	B.11: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Juli- September 2023	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.12: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat (B.10-12)	B.12: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Oktober-Desember 2023	
32	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI	Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas	Seluruh Lapas/Rutan/Bapas telah menerapkan SPPT TI	B.01: 1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	B.01: 1. SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	DIV PAS
				B.02: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.02: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.03: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.04: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.04: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.05: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.05: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.06: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.06: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.07: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.07: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.08: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.08: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.09: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.09: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.10: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.10: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.11: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.11: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.12: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
33	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i>	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i>	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i>	B.01: Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat	B.01: SK Tim	DIV PAS
				B.02: Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat	B.02: Laporan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat	
				B.03: Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif	B.03: Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa	
				B.04: Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Masyarakat dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat	B.04: Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Masyarakat dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.05: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.05: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.06: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.06: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.07: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.07: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.08: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.08: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.09: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.09: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.10: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	B.10: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	
				B.11: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	B.11: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	
				B.12: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	B.12: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	
34	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun	B.01: Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas.	B.01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan.	DIV PAS

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	B.02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	B.02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas	
				B.03: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B.04: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.05: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.06: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.06: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.07: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.07: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.08: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.08: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.09: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.09: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.10: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.10: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.11: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.11: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.12: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B.12: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%.	<p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan pembinaan narapidana tahun 2023 	<p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 2. Laporan hasil penilaian pada bulan Desember. 3. Laporan hasil tindak lanjut SE tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023. 	DIV PAS
				<p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023. 	<p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Laporan hasil Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023. 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.03:</p> <p>1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p>	<p>B.03:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.04 :</p> <p>1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p>	<p>B.04:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.05:</p> <p>1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p>	<p>B.05:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.06:</p> <p>1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p>	<p>B.06:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Mei. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.07:</p> <p>1.75% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.75% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.75% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.75% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p>	<p>B.07:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.08:</p> <p>1.80% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.80% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.80% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.80% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p>	<p>B.08:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.09:</p> <p>1.85% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.85% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.85% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.85% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p>	<p>B.09:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.10:</p> <p>1.90% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.90% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.90% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.90% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p>	<p>B.10:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.11: 1.95% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara. 2.95% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.95% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.95% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p>	<p>B.11: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.12: 1.100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara. 2.100% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.</p>	<p>B.12: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan November. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA	B01 1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT 2. Pembentukan UIP pada setiap UPT 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT 4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 5. Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B01 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja 2. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 3. Rekap dari kanwil nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT 4. laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini 5. Laporan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi	DIV PAS
				B02 1. Pembentukan UIP pada setiap UPT 2. Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B02 1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap UPT 3. Laporan hasil konsolidasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat</p> <p>3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B03</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis anggota UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B05 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>3.Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib</p> <p>4.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B06</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencan a aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>3.Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p>	
				<p>B07</p> <p>1.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel</p> <p>2.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B07</p> <p>1.Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>2.Laporan hasil konsolidasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arahkebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan intelijen 3.Laporan hasil konsolidasi 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
36	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01 Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	B01 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	
				B02 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B02 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B03 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B03 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B04 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B04 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B05 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B05 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B06 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B06 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B07 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B08 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B08 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B09 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B09 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B10 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B10 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B11 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B11 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B12 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B12 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIVISI IMIGRASI						
37	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	Diimplementasikannya layanan Paspor <i>Online</i> terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor <i>Online</i> secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik) Catatan: Data secara kelompok harus dibatasi sebagaimana Eazy paspor dan paspor simpati	B03 1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor <i>Online</i> kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	B03 1. Kompilasi laporan uji coba dan data pelaksanaan sosialisasi paspor <i>Online</i> oleh Divisi Keimigrasian 2. Laporan sosialisasi Paspor <i>Online</i> (per Satuan Kerja) beserta Dokumentasi 3. Uji coba kesisteman	DIV IMI
				B06 1. Penerapan Paspor <i>Online</i> 2. Evaluasi Penerapan Paspor <i>Online</i> oleh Divisi Keimigrasian kepada Satuan Kerja	B06 1. Laporan Implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasi (per satuan kerja) 2. Laporan Evaluasi Implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasi (oleh Divisi Keimigrasian)	
				B09 1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi	B09 Laporan monitoring dan evaluasi Divisi Keimigrasian kepada satuan kerja terkait implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasinya	
				B12 Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor <i>Online</i>	B12 Dokumen Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan setiap satuan kerja yang direkapitulasi oleh Divisi Keimigrasian	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
38	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B03 1. Pembentukan tim klasifikasi SDM 2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B03 1. SK Tim 2. Data SDM yang terklasifikasi untuk dilatih 3. Laporan pelaksanaan pelatihan teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	DIV IMI
				B06 pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B06 Dokumen Hasil Pendataan	
				B09 Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B09 Dokumen hasil monitoring	
				B12 Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B12 Laporan Evaluasi dan Dokumentasi	
39	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing	Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	B03: 1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi	B03: 1. Sk Tim 2. Laporan kegiatan hasil rapat pembahasan	DIV IMI
				B06: 1. Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing 2. pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah	B06: 1. Hasil pendataan penjamin orang asing 2. Laporan hasil pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin	B09: Laporan hasil monitoring	
				B12: Monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian	B12: Rekapitulasi laporan hasil monitoring, evaluasi dan penindakan	



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

JL. H. R. RASUNA SAID NO.KAV. 6, RT.16/RW.7, KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12940

BerAKHLAK
Santiaosng Pelayoman, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI** REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA